



**WIRA**  
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# PENETAPAN KOMCAD TNI TAHUN 2022



EDISI III/2022

EISSN 1943-0211



INDONESIA



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan  
Republik Indonesia



@Kemhan\_RI



berkemhan



Kemhan RI





Para pembaca WIRA yang Dirahmati Allah,

Tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya di penghujung tahun 2022 ini tim redaksi Majalah WIRA dapat kembali menghadirkan informasi menarik kepada pembaca setia WIRA seputar dunia pertahanan yang disajikan dalam bentuk berita, foto maupun infografis.

Sejumlah berita dan foto terkait kegiatan Pimpinan Kementerian Pertahanan baik didalam maupun diluar negeri kami rangkum dan sajikan dalam rubrik Fokus Pimpinan.

Tak kalah menariknya, dalam edisi WIRA kali ini juga menampilkan empat artikel yang ditulis secara langsung oleh para pakar di bidangnya yang mengangkat berbagai isu-isu terkini mengenai Capaian Universitas Pertahanan RI Menuju *World Class Defense University*, Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)* dengan konsep eco-green, Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Doktrin Pertahanan Negara dan Mengembangkan Sistem Kesehatan Pertahanan Negara pada Era Revolusi Industri 4.0.

Untuk perbaikan dan kemajuan majalah WIRA kedepannya kami terbuka dan menyambut kritik, saran dan masukan pembaca setia WIRA yang dapat dikirimkan ke redaksi WIRA di Biro Humas Setjen Kemhan Bagian Infopublikata, Gedung AH. Nasution Lt. 9 atau dapat melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat di akses melalui web Kemhan di [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Besar harapan kami, para pembaca setia dimanapun berada dan dari kalangan apapun dapat berpartisipasi untuk mengirimkan artikel atau tulisan yang dapat memperkaya majalah WIRA pada edisi berikutnya.

Akhir kata, selamat membaca majalah WIRA edisi III tahun 2022.

Salam Bela Negara.

Kepala Biro Humas,

Brigjen TNI Taufiq Shobri, M.Han

## DEWAN REDAKSI

**Pelindung/Penasihat:** Sekjen Kemhan/Marsdyo TNI Donny Ermawan T., M.D.S. - **Penanggung Jawab:** Karo Humas Setjen Kemhan/Brigjen TNI Taufiq Shobri, M.Han - **Redaktur :** Kol. Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si. - **Editor :** Endang Rahayu, S.Sos, M.AP., - **Desain Grafis:** Imam Rosyadi- **Fotografer:** Acep Sutawijaya - **Sekretariat :** Kapten Cku Lindu Baliano/Mandiri Triadi, S.Sos, M.M - **Diterbitkan oleh:** Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

# Daftar Isi

## Fokus Utama>>

Menhan Dampingi Wapres RI Tetapkan Komponen Cadangan TNI 2022

6



Dalam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional, komponen cadangan (komcad) sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

## Fokus Pimpinan>>

Menhan Prabowo dan Menhan Malaysia Tandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan RI – Malaysia

9

Menhan Prabowo Subianto Terima Empat Bintang Kehormatan Utama dari Pemerintah Indonesia

11

Disaksikan Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Serahkan Sepeda Motor ke Kodim 1503/Tual Maluku

13

Atraksi Pesawat Tempur F-16 Meriahkan Peringatan Ke-77 HUT TNI

14

Wamenhan RI Dukung Penuh Kerjasama Pertahanan RI – Singapura

16

Wamenhan RI M. Herindra Hadiri ASEAN – RoK Defense Vice Ministerial Meeting

17

Sekjen Meresmikan Ruang PPID Kemhan

18

Setjen Kemhan RI Meriahkan HUT RI Ke-77 dengan Adakan Lomba Khas 17 Agustus

19

Kemhan Semarakkan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-27 dengan Selenggarakan Pekan Litbanghan

20

## Artikel>>

Capaian Universitas Pertahanan RI Menuju *World Class Defense University* (Penulis: Laksda TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD, ASEAN Eng)

21

Pengelolaan Kawasan Indonesia *Peace And Security Center (IPSC)* Dengan Konsep *Eco-Green* (Penulis Brigjen TNI Sudaryanto,S.E.)

26

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Doktrin Pertahanan Negara (Penulis:Kolonel Laut (K) Dr. Steven T. Sambouw, S.H., S.Kep., M.H., M.A.P)

32

Mengembangkan Sistem Kesehatan Pertahanan Negara pada Era Revolusi Industri 4.0 (Penulis: drg. Pongki Sipahutar,Sp.KG)

37

49



Fokus Lensa>>





# MENHAN DAMPINGI WAPRES RI TETAPKAN **KOMPONEN CADANGAN TNI 2022**

Oleh : Tim Redaksi

Sumber foto : Biro Humas

**D**alam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional, komponen cadangan (komcad) sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, mengamanatkan Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara, yang pelaksanaannya melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yaitu TNI yang dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Mencermati kondisi kesiapan komponen cadangan saat ini dihadapkan pada hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, maka perwujudan komponen cadangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana menjadi suatu keharusan.

## Penetapan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Sejumlah 2.974 orang saat ini tergabung dalam Komponen Cadangan Pertahanan Negara

yang terbagi menjadi lima batalyon dan dilatih di tiga matra yaitu darat, laut dan udara. Pelatihan tersebar di Rindam wilayah Indonesia yaitu 450 orang di Rindam II/Sriwijaya, 500 orang di Rindam VI/Mulawarman dan 500 orang di Rindam XIV/ Hasanuddin. Kemudian 499 orang Matra Laut di Kodikmar Surabaya, 500 orang Matra Udara di Pusdiklat Kopasgat, Bandung serta 50 orang wanita dilatih di Pusdik Kowad dan 475 orang Kadet Unhan di Unhan RI

Dalam laporannya saat mendampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin saat upacara penetapan Komponen Cadangan Pertahanan Negara di Lapangan Terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9), Menhan Prabowo menyampaikan proses pembentukan Komponen Cadangan TA. 2022.

Dimulai dari proses pendaftaran secara sukarela pada 1 Maret - 8 Mei 2022, tahapan

seleksi 9 - 27 Mei 2022, kemudian Pendidikan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) 30 Mei - 27 Agustus 2022 serta penetapan pada 8 September 2022 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Selain dilatih kemiliteran, peserta pelatihan komcad juga dilatih kolone senapan, bela diri, bongkar pasang senjata, *fly pass* pesawat TNI AU, kemampuan memecahkan benda keras, parko dan senam balok. Kemampuan itu ditunjukkan dalam demonstrasi ketangkasannya dihadapan Wapres, Menhan dan tamu undangan yang hadir dalam upacara penetapan Komcad TA. 2022. Seluruh peserta terlihat sigap dan tangkas menunjukkan kemampuannya.

#### **Pesan Wakil Presiden kepada Peserta Pelatihan Komponen Cadangan**

Potensi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Untuk



Sumber foto : Biro Humas

itu diperlukan modal sosial yang kuat bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah gejolak yang terjadi.

Terdapat empat langkah yang dapat dilakukan dalam memupuk modal sosial yaitu *pertama*, pelatihan pertahanan Komponen Cadangan agar didesain dalam perspektif yang luas, menggabungkan pola pertahanan konvensional dan ancaman non-tradisional. Pola pikir dalam mempertahankan kesatuan negara tidak hanya dalam perspektif senjata. Namun lebih luas lagi, dapat dilakukan dengan berbasis digital.

*Kedua*, perlu dikembangkan narasi yang optimistik dalam komunikasi publik terkait peran dan fungsi Komponen Cadangan, sehingga muncul kesadaran kolektif seluruh anak bangsa untuk ambil bagian dalam upaya bela negara yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Melalui kesadaran ini, akan lebih besar lagi kekuatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan mewujudkan Indonesia Maju.

*Ketiga*, promosi bela negara pada generasi muda membutuhkan terobosan yang inovatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan pelatihan yang kreatif dan kekinian agar program bela negara efektif menjangkau berbagai kelompok sasaran.

Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan pelatihan, anggota Komponen Cadangan agar tetap menjaga mandat sebagai Komponen Cadangan seraya terus menjadi inspirasi bela negara bagi masyarakat. Wapres berharap peserta pelatihan Komcad yang saat ini telah menyelesaikan pelatihan, dapat kembali ke tempatnya masing-masing dan terus menjalankan mandat yang telah didapat dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas



Sumber foto : KBRI Malaysia

## MENHAN PRABOWO DAN MENHAN MALAYSIA TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN PERTAHANAN RI – MALAYSIA

**S**idang General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) ke-42 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung mulai tanggal 8 sampai 10 Agustus 2022 dipimpin secara bersama-sama (*co-chaired*) oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein Malaysia.

Sidang GBC Malindo yang pada tahun 2022 telah memasuki usia 50 tahun, kedua Menteri Pertahanan, Selasa (9/8), menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang kerja sama pertahanan yang mengangkat sejumlah agenda penting di bidang operasi dan non-operasi. Bidang operasi meliputi intelijen, operasi darat, laut, udara, maritim, komunikasi dan elektronik, search and rescue serta kepolisian.

Sedangkan bidang non-operasi meliputi pembangunan pos lintas batas, pertukaran pelatih dan latihan bersama militer kedua negara

serta terbentuknya kesepakatan penambahan pos gabungan bersama yang baru, untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara kedua negara.

Bagi Indonesia, seperti dikatakan Menhan Prabowo, Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang spesial. Pemerintah Indonesia menyambut baik segala upaya untuk lebih mempererat hubungan Indonesia dengan Malaysia, serta kerja sama yang lebih erat di segala bidang. Kerja sama tersebut meliputi dialog bilateral berkala dan konsultasi isu

# 1972

# 2022



Menteri Pertahanan RI Maraden Panggabean dan  
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Wakil Perdana  
Menteri ke-2 Malaysia Tun Dr Ismail bin Abdul Rahman

strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, berbagi informasi strategis di bidang pertahanan dalam simposium, seminar maupun kunjungan studi, serta kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata kedua negara.

Selain itu juga kerja sama pertukaran personel, pendidikan, latihan, dan dukungan logistik, kerja sama ilmu pengetahuan dan

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan  
Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri  
Hishammuddin bin Hussein

teknologi pertahanan, kerja sama industri pertahanan serta kerja sama pertahanan dalam bentuk lain yang diputuskan bersama.

"Saya berterimakasih, saya hari ini menandatangani MoU yang sangat strategis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang, 50 tahun kemudian pun akan tetap punya manfaat," tegas Menhan Prabowo.\*\*\*



Sumber foto : KBRI Malaysia

# MENHAN PRABOWO SUBIANTO TERIMA EMPAT BINTANG KEHORMATAN UTAMA DARI PEMERINTAH INDONESIA

**P**emerintah Indonesia menganugerahkan Empat Tanda Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tanda Kehormatan disematkan Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan kepada Menhan Prabowo Subianto dalam suatu upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Ruang Hening, Kemhan, Jakarta, Senin (15/8). Empat bintang kehormatan tersebut yaitu Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

## 1. Bintang Yudha Dharma Utama



Menhan Prabowo Subianto menerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai penghargaan kepada WNI bukan anggota TNI atau Pegawai Negeri Sipil TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanda Kehormatan disematkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

## 2. Bintang Kartika Eka Paksi



Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi diberikan pemerintah Indonesia kepada Menhan Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/TK/Tahun 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi. Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi diberikan sebagai bentuk Penghargaan kepada anggota TNI Angkatan Darat yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. Tanda Kehormatan disematkan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.

## 3. Bintang Jalasena Utama



Pemerintah Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Utama kepada Menhan Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Utama. Tanda Kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia bukan Anggota TNI Angkatan Laut yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut. Tanda Kehormatan disematkan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono.

#### 4. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama



Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama diberikan pemerintah Indonesia kepada Menhan Prabowo Subianto sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) bukan anggota TNI Angkatan Udara yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara. Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama diberikan kepada Menhan Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. Tanda Kehormatan disematkan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas



Sumber foto : BPMI Setpres

## DISAKSIKAN PRESIDEN JOKOWI, MENHAN PRABOWO SERAHKAN SEPEDA MOTOR KE KODIM 1503/TUAL MALUKU

Kendaraan bermotor diberikan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Kendaraan bermotor yang diberikan merupakan produksi lokal yang dibuat oleh perusahaan dalam negeri PT Pindad dan PT LEN dibawah holding industri pertahanan yaitu Defend ID.

“Pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial menjadi salah satu unsur yang sangat penting, jadi semua Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam akan kita berdayakan. Jadi itu ada dalam rencana besar kita, yang merupakan bagian dari pertahanan negara yang sistemnya adalah Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta),” ujar Menhan.\*\*\*



Sumber foto : BPMI Setpres



Sumber foto : BPMI Setpres

Atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih raksasa dan juga atraksi *fly pass* pesawat tempur TNI menghiasi langit ibukota Jakarta meriahkan peringatan ke-77 Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI), Rabu (5/10). Diawali dengan formasi *fly pass* 8 (delapan) pesawat tempur F-16 *Fighting Falcon* yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran udara lawan udara (*air to air*) ataupun udara lawan darat (*air to ground*).

Atraksi dilanjutkan dengan penampilan pesawat helikopter dari tiga matra yang membawa bendera merah putih raksasa ukuran 20 meter kali 30 meter. Bendera dibawa oleh Helikopter EC-725 Caracal dan NAS-332 Super Puma yang diikuti Helikopter Apache AH-64 E dari TNI AD dan Helikopter

Phanter AS-565 dari TNI AL. Atraksi ditutup dengan penampilan tim Jupiter yaitu pasukan akrobatis TNI AU. Rangkaian atraksi tersebut secara bergantian melintasi langit Istana Merdeka dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo beserta Menhan dan tamu undangan lainnya.

Selain itu sejumlah alutsista turut dipamerkan dalam HUT ke-77 TNI antara lain *Multipurpose Combat Vehicle* buatan Prancis yang mampu melakukan tembakan hingga jarak 6.5 km, alat radar *MCP Mistral* buatan Prancis yang memiliki spesifikasi teknis hingga radius 30.000 meter dan meriam 155 mm Caesar yang memiliki jarak tembak hingga 39 km. Ada pula *Derlikon Skyshield* buatan Swiss yang merupakan kendaraan penangkis serangan udara jangka pendek, dan *MLRS RM 70 Vampire* buatan Cekoslovakia yang memiliki jarak tembak hingga 20 kilometer serta *P6 Atav*, *Komodo*, dan *Bushmaster*.

Sebelumnya berlangsung upacara peringatan ke-77 HUT TNI di halaman Istana Negara Jakarta yang dihadiri Wakil Presiden RI, Menhan RI Prabowo Subianto, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan serta Kapolri. Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara sementara Perwira Upacara adalah Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Dalam peringatan yang mengusung tema "TNI adalah Kita" Presiden menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan kerja keras seluruh jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.\*\*\*



Sumber foto : BPMI Setpres



Sumber foto : Biro Humas

## WAMENHAN RI DUKUNG PENUH KERJASAMA PERTAHANAN RI – SINGAPURA

Kementerian Pertahanan, TNI dan Angkatan Bersenjata Republik Singapura memiliki visi yang sama untuk meningkatkan hubungan yang telah terjalin kearah yang lebih baik. Dalam beberapa waktu terakhir intensitas interaksi dan komunikasi kedua negara menunjukkan peningkatan kualitas kerja sama yang lebih baik.

Mengingat letak geografis Indonesia dan Singapura yang wilayah perairannya merupakan kawasan padat lalu lintas, mengharuskan kedua negara untuk memaksimalkan pengembangan kerja sama angkatan lautnya yang dituangkan dalam *Forum Navy to Navy Talks*. Seperti diketahui Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan pada 25 Januari 2022 dan perjanjian ini sedang proses ratifikasi.

Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra menerima kunjungan kehormatan

*Chief of Navy of Republic of Singapore Rear Admiral (RADM)* Aaron Beng yang didampingi Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono beserta delegasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (18/8).

“Kementerian Pertahanan RI mendukung penuh kerja sama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Singapura, yang dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan, integritas territorial serta hukum internasional”, tegas Wamenhan RI. \*\*\*

## WAMENHAN RI M. HERINDRA HADIRI ASEAN - ROK *DEFENSE VICE MINISTERIAL MEETING*



Sumber foto : Dok. Pribadi Wamenhan

**W**akil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra menghadiri Pertemuan Wakil Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN dengan Wakil Menteri Pertahanan Republik Korea atau ASEAN-Republic of Korea Defense Vice Ministerial Meeting (DVMM), di Seoul Korea Selatan.

Pertemuan yang digelar tanggal 6 - 7 September 2022 dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea Y.M. Shin Beom Chul, Selasa (6/9).

Adapun topik yang diangkat dalam pertemuan yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017 yaitu, "Langkah-langkah Pengembangan Kerja Sama Pertahanan ASEAN dan Republik Korea untuk Perdamaian dan Kemakmuran Kawasan (Measures for the Development of RoK ASEAN

Defense Cooperation for the Peace and Prosperity of the Region).

Sebagai salah satu mitra wicara ASEAN, Republik Korea (RoK) bersama dengan negara-negara ASEAN bertukar pandangan terkait situasi keamanan di kawasan dan rencana Implementasi kerja sama pertahanan RoK dan ASEAN serta capaian-capaian kerja sama yang telah terjalin.\*\*\*

## SEKJEN MERESMIKAN RUANG PPID KEMHAN



Sumber foto : Biro Humas



**S**ekretaris Jenderal Kemhan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto dengandampingi Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan), Kepala Biro Humas Setjen Kemhan serta Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Setjen Kemhan meresmikan Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertahanan (PPID Kemhan), di Kemhan, Jakarta, Selasa (13/9). Peresmian Ruang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sekjen Kemhan. Sebelumnya Karo Humas Brigjen TNI Taufiq Shobri, selaku PPID Kepala, memaparkan tentang Kesiapan Fasilitas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perizinan Alpalhankam dalam rangka penilaian serta evaluasi tingkat kementerian atau lembaga. Turut pula diserahkan hasil penilaian BPK RI Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Satker Biro Humas Setjen Kemhan.\*\*\*

# SETJEN KEMHAN RI MERIAHKAN HUT RI KE-77 DENGAN ADAKAN LOMBA KHAS 17 AGUSTUS

**S**ekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Setjen Kemhan RI) yang membawahi delapan satuan kerja (satker) menggelar sejumlah lomba menyambut Hari Ulang Tahun RI Ke-77, yang diawali dengan olahraga bersama di lapangan Bela Negara, Kemhan, Jakarta, Jumat (12/8).

Perlombaan memeriahkan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan secara beregu antarsatker ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan anggota Setjen Kemhan yang dalam menjalankan tugasnya saling berhubungan dan bekerja sama. Selain itu, perlombaan beregu ini diharapkan dapat melatih sportivitas dan meningkatkan imunitas tubuh.

Di sela-sela kesibukannya, Sekjen Kemhan RI Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto berkesempatan menyaksikan lomba khas 17 Agustus, yang diikuti delapan satker di jajaran

Setjen Kemhan yakni: Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Peraturan dan Perundang-Undangan, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Hukum. Jenis lomba khas yang digelar berupa lomba makan krupuk, memasukkan paku dalam botol, balap bakiak beregu, memindahkan air estafet, memindahkan kelereng dengan sendok estafet dan pertandingan bola voli. \*\*\*



Sumber foto : Biro Humas

## KEMHAN SEMARAKKAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL KE-27 DENGAN SELENGGARAKAN PEKAN LITBANGHAN

Pekan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-27 yang jatuh tanggal 10 Agustus setiap tahunnya. Dalam Pekan Litbanghan yang digelar di Balitbang Kemhan Jakarta juga menampilkan pameran hasil penelitian dan pengembangan pertahanan, seminar, dan lomba karya inovasi teknologi pertahanan.

Pekan Litbanghan diselenggarakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden untuk mengubah paradigma dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kegiatan ini diharapkan dapat turut

mendukung kebijakan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil menengah serta koperasi guna menyukkseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekjen Kemhan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto saat membuka Pekan Litbanghan, Kamis (11/8), menyampaikan harapan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk terus bekerja keras dan mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai anak bangsa dapat memacu diri untuk terus meningkatkan inovasi, kemandirian serta profesionalisme, sehingga mampu bersaing dengan negara lain.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas

# CAPAIAN UNIVERSITAS PERTAHANAN RI MENUJU WORLD CLASS DEFENSE UNIVERSITY



Oleh: Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng

Sumber foto : Humas Unhan

## Pendahuluan

**I**ndonesia merupakan negara ke-48 yang memiliki Lembaga Pendidikan Tinggi Pertahanan. Sejak tahun 2009 Universitas Pertahanan (Unhan) RI didirikan dengan tujuan menciptakan terobosan dalam pendidikan pertahanan negara yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan yang handal, dalam membangun sekaligus mengawaki sistem pertahanan negara guna menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan RI, maka pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia baik prajurit TNI maupun komponen bangsa lainnya. Kepentingan ini menjadi program pemerintah dalam mengedukasi warga negaranya secara lebih luas tentang pertahanan negara. Pemahaman pertahanan negara pada dasarnya tidak hanya berbasis pada pemikiran dalam pertahanan pada lingkup terbatas, namun dalam cakupan yang lebih luas yaitu keamanan nasional suatu negara.

Kualitas SDM merupakan faktor penentu dalam kekuatan dan kemampuan pertahanan negara guna mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan terhadap negara. Pembangunan SDM pertahanan negara menuntut inovasi maupun modifikasi terus menerus dalam kualitas maupun kebijakan pendidikan secara

komprehensif yang harus dipahami segenap pemangku kepentingan. Dari perspektif Filsafat Pendidikan Modern, maka Unhan RI sebagai *Center of Excellence on Defence Science and Military Intellectual* dapat ditinjau dari tiga aspek. Secara Ontologis, Unhan RI menitik-beratkan pada ilmu pertahanan yang memiliki karakteristik ilmu yang bersifat multidisipliner dengan



Sumber foto : Biro Humas

pemahaman komprehensif secara filsafati bersumber dari kebutuhan manusia untuk selalu ingin mendapatkan rasa aman dan selanjutnya mempertahankan rasa aman itu sendiri. Secara Epistemologis, pengembangan ilmu pertahanan yang holistik diselenggarakan menggabungkan interdisiplin dan transdisiplin mulai ilmu-ilmu politik, sosial, ekonomi, humaniora, hingga teknik militer dan teknologi pertahanan berdasarkan nilai-nilai kejuangan dan karakter ke-Indonesia-an. Banyak sekali teknologi maju saat ini yang dikembangkan dari kebutuhan militer. Secara Aksiologis, maka pemanfaatan ilmu pertahanan tidak saja digunakan untuk berperang dengan benar, tetapi juga untuk mencegah perang dan/ atau mengakhiri perang dengan bermartabat. Jelas, tujuan ilmu pertahanan dari ketiga aspek tersebut adalah untuk menjaga eksistensi manusia dengan peradaban yang selalu lebih baik.

Ketika Pandemi Covid-19 melanda dunia tahun 2020, maka Unhan RI mengembangkan ilmu kedokteran militer, bersama-sama dengan ilmu farmasi militer dengan tujuan meningkatkan rasio kecukupan tenaga kesehatan di lingkungan TNI dan Kemhan RI. Mengimbangi kedua ilmu tersebut, maka Unhan RI juga mengembangkan ilmu MIPA militer dan ilmu Teknik Militer sehingga berdiri 11 Program Studi S1. Ketika Pandemi Covid-19 berdampak menurunnya ketahanan pangan, maka Unhan RI mengembangkan ilmu logistik militer melalui pendirian 7 Program Studi D3. Berdirinya Program Studi D3 dan S1 melengkapi Program Studi S2 dan S3 yang sudah terselenggara selama ini. Guna lebih menjamin pemanfaatan ilmu pertahanan tersebut, maka Unhan RI juga membentuk Lembaga Sertifikasi dengan skema Lembaga Sertifikasi

Person, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas para dosen sesuai dengan kompetensi yang dibangun. Pengembangan yang dilakukan selama ini juga ditujukan untuk mencapai tahapan dalam mewujudkan visi Unhan RI sebagai *World Class Defense University (WCDU)*.

### Transformasi Unhan RI Berkelas Dunia

Sejak awal berdirinya, Unhan RI telah mencanangkan visinya menjadi institusi pendidikan tinggi pertahanan terdepan yang berstandar kelas dunia dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Di masa mendatang, para dosen Unhan RI memenuhi syarat dan kriteria sebagai dosen internasional mengoptimalkan teknologi pendidikan yang ada. Kurikulum pendidikan dan topik-topik penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi juga harus memiliki kesetaraan dengan universitas pertahanan negara-negara lain. Unhan RI banyak melakukan berbagai kerjasama pendidikan dengan berbagai universitas terkemuka di dalam negeri, seperti Universitas Indonesia, IPB, ITB, Universitas Airlangga, UGM, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, serta beberapa universitas di luar negeri, seperti Cranfield University, U.S. NPS and U.S. NDU, Australian National University, NDU PLA China, Korean National Defence University, Wako University Japan, RSIS, National Defence College of the Philippines, dan Burapha University Thailand. Bahkan Unhan RI telah diterima sebagai *associate member* pada European Security and Defence College. Unhan RI juga bekerjasama dengan organisasi *think tank*, seperti Asia-Pacific Center for Security Studies dan organisasi profesi, seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers, menyelenggarakan serangkaian seminar internasional.

Semua capaian tersebut hingga kini dinilai memenuhi sasaran *Grand Design* Unhan RI 2015-2039, yang merupakan suatu dokumen perencanaan dalam kurun waktu 25 tahun dengan berbagai program kegiatan sesuai tahapan per lima tahunan secara terstruktur dan sistematis. Dokumen tersebut juga membahas berbagai isu-isu strategis dunia yang dikaji lebih mendalam melalui analisis untuk selanjutnya menentukan strategi-strategi yang tepat guna dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam dinamika lingkungan strategis. Universitas berkelas dunia mengandung makna parameter global yang

bertujuan untuk memajukan kepentingan dan kehidupan masa depan masyarakat Indonesia agar bisa setara dan bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Konsep tersebut merupakan sebuah konsep perguruan tinggi yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya kepada masyarakat di mana universitas tersebut berada, tetapi juga untuk komunitas internasional. Unhan RI telah banyak menerima mahasiswa dari manca negara dan selanjutnya dalam waktu dekat akan mengirim mahasiswanya untuk mengikuti pendidikan di beberapa universitas terkemuka di dunia selama beberapa semester.

### **Tujuan dan Sasaran Strategis Grand Design Unhan RI**

Tujuan Grand Design Unhan RI sebagai WCDU meliputi; pertama, mengembangkan potensi calon pimpinan sipil dan militer yang profesional serta memiliki nilai-nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademik melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;

Kedua, menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu pertahanan dan bela negara dalam mendukung kepentingan nasional serta berdaya saing di dalam dan luar negeri; ketiga, meningkatkan penyelenggaraan program pendidikan kesadaran bela negara kepada civitas akademika guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; keempat, meningkatkan Tridharma perguruan tinggi, administrasi dan operasional pendidikan dan dukungan fasilitas pendidikan di bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional, teknologi pertahanan, dan kesehatan militer.

Guna memastikan tercapainya tujuan *Grand Design*, maka telah disusun pemetaan sasaran yang akan difokuskan oleh seluruh unit kerja, yaitu:

1. Sasaran pertama, yaitu tercapainya; a) Lulusan yang siap menempati posisi strategis di lingkungan TNI, Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan sistem pertahanan negara; b) Lulusan yang menempati posisi strategis di lingkungan lembaga non-pemerintah baik di pusat maupun daerah yang bisa berkontribusi terhadap kemajuan pertahanan negara;

dan c) Lulusan yang berperan aktif mendukung pengembangan Unhan RI.

2. Sasaran kedua, yaitu tercapainya; a) Hasil akreditasi nasional oleh BAN-PT yang maksimal baik tingkat universitas maupun tingkat program studi; b) Pengakuan internasional terhadap standar kelas dunia pendidikan di Unhan RI secara formal melalui peringkat perguruan tinggi; dan c) Pengakuan internasional terhadap standar kelas dunia pendidikan di Unhan RI secara informal dan *de facto* yang ditandai oleh tingginya tingkat pengiriman mahasiswa mancanegara, serta dosen, staf pengajar dan tenaga peneliti internasional ke Unhan RI.
3. Sasaran ketiga, yaitu tercapainya; a) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unhan RI minimal 80% dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional nasional maupun internasional; b) Jurnal Unhan RI terakreditasi nasional (100%) dan berprestasi internasional (minimal 80%); dan c) Hasil penelitian Unhan RI mampu menjawab persoalan nasional, regional maupun internasional di bidang pertahanan.
4. Sasaran keempat, yaitu tercapainya; a) Rekrutmen SDM dosen dan mahasiswa Unhan RI yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (multidisiplin dan interdisiplin) dengan tetap memperhatikan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi; dan b) Meningkatkan jaringan kerjasama yang luas dan kuat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga *think-tank*, semua stakeholders pertahanan tingkat nasional, regional dan global dalam pengembangan keilmuan dan teknologi bidang pertahanan.
5. Sasaran kelima, yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas dosen, peneliti dan mahasiswa internasional dan terselenggaranya berbagai event strategis berskala nasional dan internasional yang dapat berkontribusi secara intelektual terhadap pengembangan sistem pertahanan negara.
6. Sasaran keenam, yaitu terwujudnya infrastruktur, laboratorium, workshop, dan



Sumber foto : Humas Unhan

sarana-prasarana pendukung pendidikan di bidang strategi pertahanan, manajemen pertahanan, keamanan nasional, teknologi pertahanan, dan kesehatan militer.

7. Sasaran ketujuh, yaitu tercapainya; a) Kerjasama bidang pendidikan dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri guna peningkatan dan pengembangan ilmu pertahanan; b) Kerjasama bidang penelitian dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri guna peningkatan dan pengembangan ilmu pertahanan; dan c) Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri guna peningkatan dan pengembangan ilmu pertahanan.

#### **Arah Kebijakan Pencapaian *Grand Design* Unhan RI**

Tahun 2015-2019, rumusan arah kebijakannya adalah; 1) Penguatan institusi; 2) Penguatan mutu lulusan; 3) Penguatan standar penelitian dan publikasi; 4) Penguatan civitas akademika dalam program pengabdian masyarakat; dan 5) Penguatan jaringan kerjasama nasional.

Tahun 2020-2024, arah kebijakannya adalah; 1) Pemantapan institusi; 2) Peningkatan partisipasi stakeholders dalam meningkatkan mutu lulusan Unhan RI di lingkungan pemerintah pusat, dan daerah serta korporasi; 3) Peningkatan Litbang dan publikasi dalam menjawab persoalan nasional, regional dan internasional; 4) Penerapan Pengabdian kepada Masyarakat yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat; dan 5) Pengintegrasian pemikir bangsa dalam menjawab persoalan bangsa.

Tahun 2025-2029, arah kebijakannya adalah; 1) Pengakuan program studi unggulan berskala internasional dan branding Unhan RI di forum

regional; 2) Peningkatan jumlah lulusan Unhan RI yang menempati posisi strategis di lingkungan pemerintah pusat dan daerah serta korporasi; 3) Pencapaian teori baru bidang pertahanan; 4) Penerapan teori dan Iptek baru bidang pertahanan di masyarakat; 5) Pengintegrasian pemikir bangsa dalam mengembangkan Iptek pertahanan; dan 6) Penguatan jaringan kerjasama regional dan internasional.

Tahun 2030-2034, arah kebijakannya adalah; 1) Pencapaian peringkat internasional; 2) Peningkatan jumlah lulusan Unhan RI yang menjadi para pemimpin di bidangnya; 3) Pengembangan dan publikasi Litbang yang mampu menjawab persoalan internasional; 4) Peningkatan program pengabdian masyarakat yang menjadi percontohan pada forum regional; 5) Pengintegrasian *think tank* dan kepeloporan pada program studi unggulan dalam menjawab persoalan bangsa; dan 6) Pemantapan jaringan kerjasama regional dan internasional.

Tahun 2035-2039, arah kebijakannya adalah; 1) Unhan RI menjadi WCDU; 2) Pemantapan Unhan RI sebagai pusat pendidikan calon pemimpin bangsa dan pemimpin dunia; 3) Pengakuan penelitian Unhan RI berkelas dunia; 4) Peningkatan program pengabdian masyarakat yang menjadi percontohan pada forum internasional, 5) Pengembangan Unhan RI sebagai *think tank* dan pelopor dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang diakui secara internasional; dan 6) Pengakuan internasional terhadap hasil kerja sama dalam pengembangan Iptek bidang pertahanan.

#### **Percepatan dan Penguatan Tahun 2020-2024**

Percepatan dan penguatan Unhan RI dalam pencapaian sasaran *Grand Design* tahun 2020-2024 dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas dosen, peneliti dan mahasiswa internasional melalui penyelenggaraan event strategis berskala nasional dan internasional, seperti *International Short Course on Managing Defence in a Wider Security Context* bekerjasama dengan Cranfield University, dan Penyelenggaraan Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21. Percepatan dan penguatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kapasitas dosen mengikuti kursus-kursus memperoleh keahlian sebagai peneliti internasional, menghasilkan berbagai artikel ilmiah jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional berprestasi, serta berbagai paten. Kualitas dosen juga lebih ditingkatkan dengan melengkapi

prosedur tetap mengintegrasikan sistem Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, dan sistem Sosiometri Dosen, sebagai dasar penetapan Beban Kinerja Dosen.

Guna mendukung kecepatan kerja para dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar sekaligus pemantauan kemajuan semua penelitian, maka Unhan RI juga telah menerapkan penggunaan *Smart Campus*. Program aplikasi *Smart Campus* merupakan Sistem Informasi Akademik Unhan RI berbasis IOT (*Internet of Thing*) and the *Campus Of Things* dengan konsep konfigurasi: 1) Terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program aplikasi Ditjen Dikti dan Ditjen Vokasi Kemendikbud-Ristek; 2) Terintegrasi dengan berbagai sistem yang sudah berlaku selama ini di Kampus Utama Sentul-Bogor, dan Kampus Satelit di Salemba-Jakarta, dan di Belu-Nusa Tenggara Timur; 3) Memudahkan pimpinan kampus untuk mengontrol dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, staf, dan semua pihak terkait; 4) Meminimalisir operator error dan meningkatkan efisiensi pihak-pihak penunjang; 5) Meminimalisir biaya pengeluaran kampus; 6) Meningkatkan kualitas kampus baik dari segi pelayanan maupun output yang dihasilkan dari proses akademik kampus; 7) Meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan industri; 8) Menyebarkan informasi secara luas, cepat, seragam; 9) Membantu, melengkapi, menggantikan tugas dosen; 10) Menunjang kegiatan belajar dan tugas dosen dalam pemenuhan Beban Kinerja Dosen serta penilaian berbasis Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, dan Sosiometri Dosen; 11)

Menambah keanekaragaman sumber referensi; 12) Menambah daya tarik untuk belajar; 13) Mencegah kemungkinan terjadinya *double entry* untuk input atau upload semua data evaluasi kegiatan akademik, semua hasil kerja mahasiswa, dan dosen; serta 14) Memudahkan pimpinan untuk menganalisa dan mengambil keputusan.

## Penutup

Mewujudkan sebuah WCDU bagi Unhan RI bukanlah suatu pilihan melainkan sebagai kebutuhan sekaligus kewajiban. Oleh karenanya, *Grand Design* 2015-2039 merupakan basis berbagai upaya dan langkah inovasi untuk mempercepat dan memperkuat capaian-capaiannya pada setiap tahapannya. Harapan yang mengemuka adalah semua capaian tahun 2020-2024 dapat menjadi landasan yang kuat pada tahapan-tahapan selanjutnya. Keberhasilan setiap capaian sangat mempengaruhi percepatan dan perkuatan capaian berikutnya pada tahapan tahun yang sama, dan juga pada tahapan tahun berikutnya.

Keberhasilan setiap capaian tersebut juga ditujukan untuk memenuhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK dan mewujudkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi dari Kemen PAN-RB. Keberhasilan capaian pada aspek peningkatan kompetensi SDM, aspek manajemen dan teknologi pendidikan, aspek publikasi, aspek hasil-hasil penelitian yang bermanfaat, dan aspek kecanggihan infrastruktur kampus dapat menjadi kebanggaan dan ikon Unhan RI.\*\*\*



Sumber foto : Humas Unhan

# PENGELOLAAN KAWASAN INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER (IPSC) DENGAN KONSEP ECO-GREEN

Oleh: Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto,S.E.  
Kapus Lola Kawasan Bainstrahan Kemhan



**K**ebutuhan ruang terbuka hijau pada sebuah kawasan akan menarik minat masyarakat untuk sekedar menghabiskan akhir pekan dalam rangka melepas penat, melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi. Taman kota dibangun di kota-kota besar dengan memperhatikan penghijauan dan konservasi tanaman (fauna). Isu mengenai lingkungan saat ini sangat gencar dikampanyekan, jika dilihat kondisi lingkungan dan kualitas udara di kota seperti Jakarta saat ini sangat mengkhawatirkan. Dampak dari rumah kaca dan kepadatan kendaraan bermotor sebagai penyebab tidak sehatnya kondisi lingkungan dan kualitas udaranya.

Bogor sebagai wilayah terdekat dengan Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi tujuan warga Jakarta untuk mendapatkan udara segar. Maka keberadaan ruang terbuka hijau itu sangat penting terutama suatu kawasan berkonsep eco-green yang diharapkan mampu mengubah suatu keadaan lingkungan yang bebas dari polusi, nyaman dan terasa sejuk saat terik matahari.

Kawasan IPSC suatu kawasan seluas 276,9 hektar merupakan kawasan terpadu yang ditempati oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) di Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat. Secara geologi kondisi Kawasan IPSC adalah tempat tumbuhnya pepohonan yang tergolong dalam jenis tanah lanau lampungan, tanah pasiran (pengembangan review 3 masterplan kawasan IPSC Sentul). Jenis tanah ini merupakan pelapukan lanjut dari batuan breksi dan lava

Gunung Kancana dan Gunung Limo, tanah berwarna merah kecoklatan, coklat kekuningan bersifat gembur dan lunak dan permeabilitas tinggi. Pada bagian tertentu mengandung kerikil dan batuan andesit (Penelitian tanah PT. Benatine Surya Cipta untuk Pus Lola Kawasan,2021). Sifat tanah demikian sangat subur dan merupakan tempat tumbuh berbagai jenis tanaman.

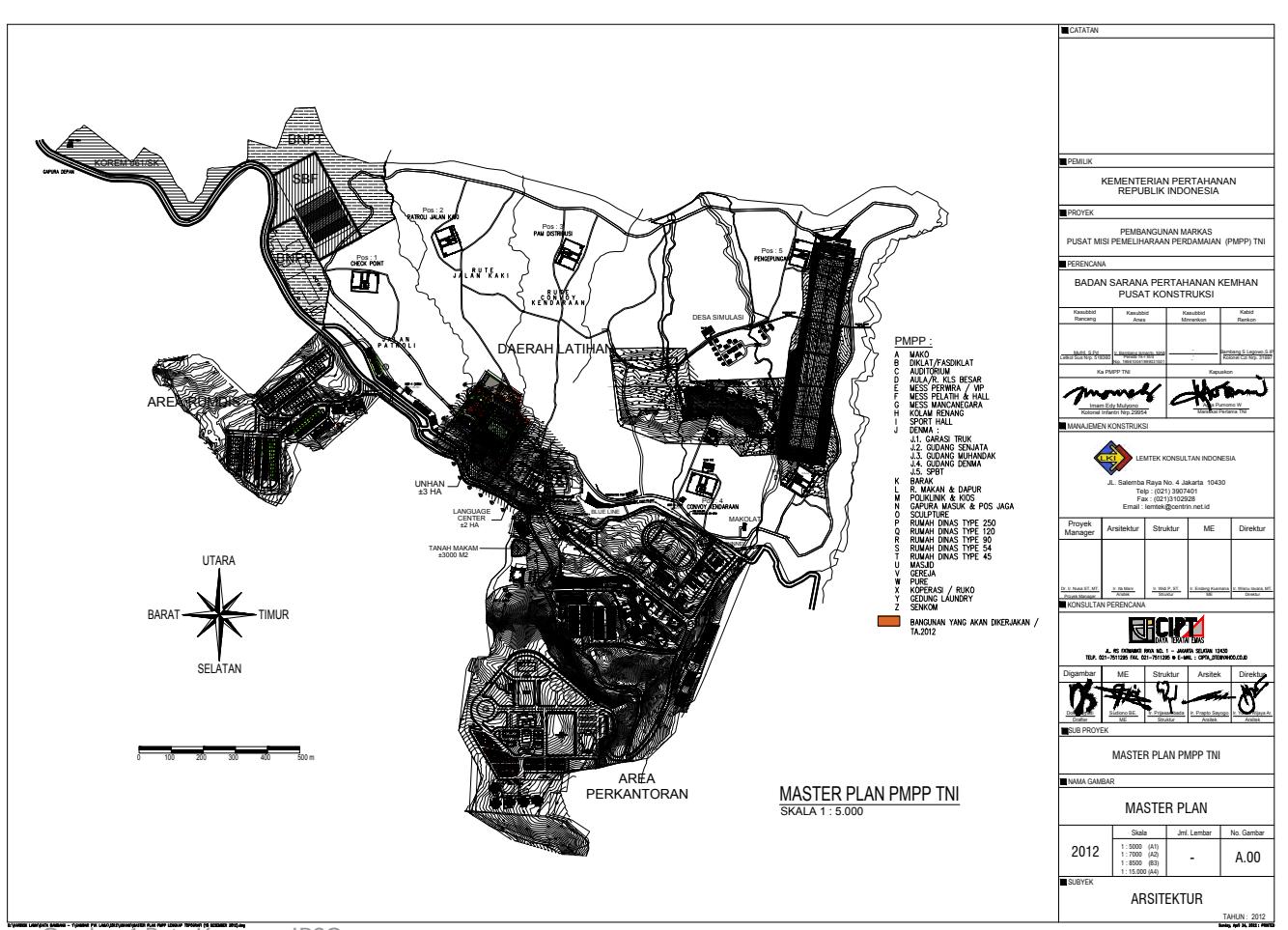
Secara umum kondisi lahan Kawasan IPSC yang berada pada ketinggian 450 meter dari permukaan laut merupakan tanah ekspansif dimana jenis tanah ini akan mengalami perubahan volume besar (mengembang) pada musim hujan dan menyusut pada musim kemarau, hal tersebut disebabkan adanya perubahan kadar air secara ekstrim. Masalah utamanya adalah adanya deformasi yang melebihi deformasi elastis (kembang susut). Kondisi demikian dibutuhkan

banyak pohon sebagai pengikat untuk mencegah adanya bencana tanah longsor.

Pus Lola Kawasan Bainstrahan Kemhan dalam tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi pengamanan, pemeliharaan dan pembangunan, pengembangan dan kerjasama instalasi strategis pertahanan dalam program kerjanya meliputi pemeliharaan sarana prasarana yang bersifat *common use* (digunakan bersama) menyadari bahwa kawasan ini mengandung potensi besar baik potensi sebagai kawasan yang dibutuhkan untuk penopang paru-paru kota Bogor dan juga berpotensi penyebab

batuan, Pus Lola harus mengontrol faktor pemicu gangguan kestabilan tanah kawasan. Mengatur Kementerian/Lembaga dan masyarakat sekitar yang akan mendirikan bangunan sementara Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sebagai kawasan strategis IPSC penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan potensi bencana itu harus diminimalisir. Pus Lola Kawasan bertekad untuk



Gambar.1 Peta Kawasan IPSC

Sumber foto : Dokumen Bidhar Pus Lola Kawasan

bencana jika tidak dikelola dengan menganut keseimbangan alam antara ruang hidup manusia dengan lingkungannya. Potensi bencana yang dimaksud adalah kejadian tanah longsor sebagai konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan Kawasan IPSC yang berlereng yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat dari ulah manusia. Untuk menjaga tanah longsor akibat terganggunya kestabilan lereng tanah atau

jadikan Kawasan IPSC sebagai kawasan hutan yang tetap terjaga kelestariannya namun tidak mengesampingkan sebagai kawasan strategis pertahanan. Hal tersebut menciptakan gagasan untuk menerapkan konsep *eco-green* sebagai ruang terbuka yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kawasan itu sendiri dan K/L Kawasan guna mendukung pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Konsep *eco-green* dalam rangka melindungi kemampuan lingkungan

kawasan dari tekanan perubahan akibat dampak negatif pembangunan sarana dan prasarana di kawasan.

Konsep *eco-green* saat ini juga sangat ramai diperbincangkan, penerapan konsep tersebut pada sebuah kawasan yang sangat luas tentu membutuhkan kerja keras dan kepedulian terhadap lingkungan sehingga tujuan untuk menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang ramah lingkungan terwujud. Pada dasarnya konsep *eco-green* ini mengajak kita untuk kembali ke alam dengan membiarkan lahan yang ada di kawasan tetap tertutup oleh tumbuhan dan pepohonan dari pada bangunan.

Penerapan *eco-green* dalam pengelolaan Kawasan IPSC oleh Pus Lola Kawasan sebagai upaya memberikan ruang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan dengan tujuan tersebut akan menciptakan suatu kawasan yang subur namun terdapat potensi bencana jika tidak dipelihara ekosistem dan habitat makhluk hidup yang berada didalamnya. Kawasan IPSC akan lebih hijau dengan gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan menjadi kawasan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang perancangannya dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemakaian material yang ramah lingkungan serta penggunaan energi dan sumber daya yang efektif dan efisien sehingga mendatangkan keuntungan bersama.

Fungsi utama (intrinsik) RTH sebagai fungsi ekologi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bahwa dapat memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau dapat dikatakan sebagai paruh-paruh dalam sebuah kawasan, sebagai pengatur iklim mikro supaya sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, pohon-pohon sebagai peneduh dapat memproduksi oksigen, akar nya dapat menyerap air hujan, pelindung hidup habitat satwa, daun-daun menyerap polutan udara dan penahan angin.

Disamping sebagai fungsi utama sasaran pengelolaan Kawasan IPSC dengan konsep *eco-green* adalah fungsi tambahan (ekstrinsik) terutama terkait fungsi sosial budaya bahwa kawasan ini berada ditengah masyarakat yang sudah menempati sebagai rumah tinggal maka kawasan ini harus menggambarkan ekspresi kearifan budaya lokal, menjadikan kawasan

sebagai komunikasi warga sekitar, tempat rekreasi dan sebagai wadah riset, pendidikan dan pelatihan dalam mempelajari alam. Peningkatan ekonomi dalam fungsi ini lebih pada hasil pengolahan sampah yang akan di desain ramah lingkungan sehingga hasil akhir pengolahan sampah dapat digunakan untuk pupuk dan memberikan pendapatan K/L yang berada di kawasan. Hasil pupuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung usaha pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Kawasan IPSC dibuat seindah mungkin sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga sekitar kawasan dan menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Jadi secara fisik Pengelolaan Kawasan IPSC sebagai penyedia RTH berupa alam liar, alami , hutan lindung yang didalamnya tumbuh pohon-pohon pelindung juga menjadi fungsi ekologis, sosial budaya, dan ekonomi.

Dalam mendukung konsep *eco-green* adalah memelihara dan penyempurnaan drainase atau penyerapan air sebagai salah satu pondasi yang penting bagi tanaman. Sistem ini merupakan tempat penyerapan air pada area lahan yang terdapat tanaman pelindung sehingga air dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah sehingga mencegah terjadinya penggenangan air.

Disamping pemeliharaan saluran drainase, Kawasan IPSC mempunyai *landscape* berbukit makan vegetasi dalam elemen *landscape* mempunyai jenis-jenis tanaman pohon berkayu keras dan dapat tumbuh tegak, berukuran besar dengan cabang kokoh dan ranting yang rimbun. Tanaman yang banyak tumbuh di Kawasan seperti Pohon Trembesi, Pohon Mahoni, Pohon Akasia dan beberapa pohon liar yang tumbuh di area latihan PMPP TNI. Area latihan PMPP TNI yang berada di Kawasan IPSC juga memiliki vegetasi tanaman jenis Perdu dan semak sebagai elemen *landscape* sebagai elemen penutup tahan disamping rumput.

Susunan vegetasi tanaman di Kawasan IPSC sekaligus memiliki fungsi estetika yang memiliki nilai keindahan karena pada jenis perdu tertentu bisa berbunga dengan baik dan dapat memberikan visual control dan *physical barriers* yaitu bahwa tanaman tersebut menjadi penghalang pergerakan manusia dalam menjaga daerah latihan secara alami. Kelebihan menjadi ruang terbuka hijau dengan tanaman yang tumbuh baik antara lain sebagai pencegah erosi mengingat terdapat

kegiatan manusia di kawasan yang menggunakan lahan untuk pertanian selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap kondisi lahan. Misalnya yang sering terjadi adalah perubahan muka tanah, dengan adanya pohon-pohon besar dan semak dapat menahan air hujan secara langsung dan tidak langsung ke permukaan tanah.

Pada konsep *eco-green* dalam pengelolaan kawasan Pus Lola Kawasan dalam pengembangan masterplan Kawasan IPSC Bogor tahun 2021 akan melaksanakan penghijauan tanaman secara berkelanjutan terutama tanaman yang sangat berguna dan sesuai dengan kondisi muka tanah kawasan. Jenis-jenis tanaman yang akan terus dikembangkan dan ditanam adalah pohon bambu sebagai pohon yang sudah dapat tumbuh dengan

baik di kawasan selain pohon bambu tanaman yang rencana akan dikembangkan di Kawasan IPSC adalah pohon damar, pohon ulin dan pohon cendana yang merupakan tanaman dengan kategori langka.

Pohon Bambu yang sudah dikenal masyarakat lokal dan memegang peranan penting dalam kehidupan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan bambu pada berbagai keperluan sejak nenek moyang. Manfaat Bambu di tengah kondisi lingkungan dunia terkait isu pemanasan global (*global warming*) akibat penebangan hutan secara illegal menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sementara upaya perbaikan hutan (*restoration*) memerlukan waktu lebih dari 10 tahun karena sifat tumbuhnya sangat lama dan lambat.



Gambar.2 UNHAN RI dan Badan Bahasa Kemendikbud Ristek

Sumber foto : Dokumen Bidhar Pus Lola Kawasan



Bambu mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus, selain itu bambu mempunyai nilai ekonomis karena hasilnya bisa diperoleh secara berkelanjutan tanpa menanam kembali. Dibalik kemudahan tentu ada faktor kelemahan tanaman ini. Durabilitas bambu sebagai bahan bangunan tidak awet dan bertahan kurang dari 5 tahun. Penggunaan bambu untuk perabot sering menimbulkan konotasi masyarakat miskin.

Selain Bambu dalam mendukung konsep eco-green Kawasan IPSC dengan penghijauan sekaligus melestarikan tanaman-tanaman bersifat langka. Penanaman pohon langka seperti Damar, Ulin, dan Cendana menjadi pilihan untuk menambah jumlah vegetasi kawasan. Pohon Damar bisa dimanfaatkan untuk diambil getahnya sebagai penghasil resin. Resin yang dihasilkan oleh Pohon Damar pada dasarnya ada resin cair dan resin padat. Setelah Damar, pohon yang cocok untuk kawasan adalah Pohon Ulin dan Cendana. Keduanya merupakan pohon yang sudah sangat jarang ditemukan, Ulin merupakan pohon yang berasal dari hutan Kalimantan yang dapat tumbuh besar sebagai peneduh dan bisa menjadi rumah dari habitat burung-burung. Pohon Ulin mempunyai peranan ekologi yang penting sebagai penghasil oksigen yang bagus pada proses fotosintesis juga dapat mempertahankan air tanah, menahan air serta mempengaruhi iklim mikro. Sebagian masyarakat tentu belum ada yang tahu bahwa Ulin berkhasiat sebagai obat, daun Ulin mengandung senyawa

kimia (blog geoprak pegunungan meratus, 2019). Daun Ulin mengandung fitokimia seperti *flavonoid*, *saponin*, *tanin* dan *sterol-terpenoid*. Kawasan IPSC yang berada pada dataran tinggi Pohon Cendana juga diharapkan dapat tumbuh baik dan Cendana juga sering ditemukan di daerah penuh bebatuan vulkanis. Cendana yang dikenal ada dua jenis yaitu Cendana Merah dan Cendana Putih. Bau harum khas Cendana berasal dari kayu dan kulit pohnnya, sering digunakan untuk rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum dan warangka keris.

Pengelolaan Kawasan IPSC dengan konsep eco-green tidak akan berhasil tanpa ada zonasi yang jelas. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah (*soil investigation*), studi pengelolaan air (*water management*) dan longsoran serta analisa dan desain dinding penahan tanah terutama pada lokasi lapangan tembak PMPP TNI dan danau buatan untuk latihan anti-teror. Maka dipandang perlu dibuat zonasi dengan pertimbangan dan perhitungan apabila akan membuat bangunan dan fasilitas pengembangan baru terutama menyangkut perhitungan struktur bangunan dan sarana prasarana Kawasan IPSC. Pembuatan zonasi antara lain Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau, dimana zona yang berpotensi longsor dan menyebabkan bencana masuk pada kategori merah, zona yang bisa dibangun untuk sarana prasarana namun dengan ketentuan masuk pada kategori kuning dan zona yang

masih bisa digunakan mendirikan bangunan kategori hijau. Penerapan zonasi merujuk pada Permen LHK No.1 Tahun 2022 tentang Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Kriteria dalam penerapan penilaian proper di Pus Lola Kawasan memberikan ketentuan kepada K/L Kawasan untuk mengendalikan pencemaran air, pemeliharaan air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, kerusakan lahan dan pengelolaan sampah.

Zonasi yang dibuat oleh Pus Lola Kawasan akan menjadi pedoman bagi K/L dalam mendirikan bangunan karena fasilitas sarana dan prasarana akan terus berkembang. Secara tidak langsung akan menambah jumlah populasi kawasan. Hal tersebut akan meningkatkan pula jumlah sampah hasil aktivitas. Penentuan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) harus tepat dan akurat. Sampah yang dikelola sesuai konsep *eco-green* adalah yang ramah terhadap lingkungan.

Sampah harus dipisahkan, sampah organik akan diolah menjadi pupuk penyubur tanaman. Kandungan organiknya akan memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan

tanah dalam mempertahankan kandungan air tanah. Sampah organik yang telah membosuk dapat menjadi humus sebagai sumber makanan tumbuh-tumbuhan menaikkan aerasi tanah. Sementara itu selain organik juga ada sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat.

Lokasi TPA sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap kawasan harus mempunyai TPA Kawasan, maka Pus Lola Kawasan akan menetapkan lokasi TPA dengan persyaratan mudah terjangkau oleh K/L Kawasan, sejauh mungkin dari kantor K/L Kawasan, dapat menampung sampah seluruh K/L dan memenuhi syarat untuk lokasi *incinerator* sampah.

Dengan pengelolaan yang baik maka konsep *eco-green* kawasan yang sebelumnya sudah melaksanakan program *go-green* akan menjadikan Kawasan IPSC menjadi paru-paru Kabupaten Bogor khususnya yang mempunyai manfaat kepada seluruh masyarakat dan K/L Kawasan. Suasana yang indah, sejuk dan bebas polusi menjadikan Kawasan IPSC sebagai magnet jalur olahraga, destinasi wisata dan tempat penelitian vegetasi yang baik.\*\*\*



Gambar.4 Bibit Pohon Damar di Kawasan IPSC

Sumber foto : Dokumen Bidhar Pus Lola Kawasan



# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

Oleh: Kolonel Laut (K) Dr. Steven T. Sambouw, S.H., S.Kep., M.H., M.A.P  
Kasubdit Sunjaklakhanneg Ditjakrastra Ditjen Strahan Kemhan

Sumber foto : Dokumen pribadi Redaksi

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang

Pertahanan negara merupakan elemen pokok suatu negara yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital dan sangat hakiki karena menyangkut eksistensi keberlangsungan hidup suatu negara.<sup>1</sup> Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar dan/atau dari dalam negeri, pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

### 2. Pengertian/ Esensi Doktrin Hanneg

Doktrin pertahanan negara pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental pertahanan negara yang

diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan negara sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan negara dihadapkan dengan berbagai dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional.

Selain itu, Doktrin Pertahanan Negara juga merupakan pedoman implementasi Sishankamrata yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

### 3. Urgensi Penyusunan Doktrin Pertahanan Negara

Untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan mampu menghadapi berbagai ancaman yang sesuai dengan kondisi karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dengan menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa, perlu dirumuskan Doktrin Pertahanan Negara yang diselenggarakan melalui Sishankamrata dengan mengacu pada UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

#### B. Pembahasan

##### 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk

peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau dikenal dengan asas *beginsel van het juiste organ*; adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan



Sumber foto : Biro Humas

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni I.C. van der Vlies membagi *beginselen van behoorlijke regelgeving* ke dalam asas-asas formal meliputi:<sup>2</sup>

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yaitu mencakup tiga hal, yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*), hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*) merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya

peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.

- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif.
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*), yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuensi. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang 'disepakati bersama' oleh pemerintah dan rakyat.

## 2. Kedudukan dan Dasar Hukum Doktrin Pertahanan Negara

Seperti yang dijelaskan pada paragraf awal bahwa Sishankamrata merupakan sebuah konsep pertahanan negara yang berdasarkan pada strategi Perang Semesta (*Total War*) yang mensyaratkan peranan penting kemanunggalan rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan.<sup>3</sup> Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, pelanggaran batas wilayah, perusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu Doktrin Pertahanan Negara yang bisa menjadi dasar sekaligus acuan dalam penyusunan doktrin pelaksanaan di masing-masing K/L.



Sumber foto : Biro Humas

Kedudukan dan stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional guna pengelolaan sistem pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara, termasuk doktrin pertahanan militer (TNI) dan pertahanan non militer. Sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan, sekaligus sebagai rujukan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, sudah sepantasnya doktrin pertahanan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah yang secara *mutatis mutandis* mengikat seluruh K/L, Pemda dan unsur bangsa yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama ini doktrin pertahanan negara ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan yang menyebabkan terjadinya keengganan dan keraguan serta kegagalan tindak lanjut K/L di luar bidang pertahanan dalam menyusun doktrin turunan di bawahnya. Beberapa K/L menyatakan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghadapi ancaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya, namun belum sejalan dengan kebijakan pertahanan negara

sehingga sulit untuk diintegrasikan. Penetapan Doktrin Pertahanan Negara dengan Peraturan Menteri Pertahanan memberi kesan bahwa Doktrin tersebut merupakan Doktrin Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Dasar hukum penyusunan Doktrin Pertahanan Negara secara gamblang tidak ditemukan dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 pasal 3 huruf a. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Bab V Pasal 20 ayat (2) yang dijelaskan pada penjelasan pasal tersirat adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk memberi ruang terhadap penyusunan Doktrin Pertahanan Negara. Bunyi lengkap pasal 20 ayat (2) dan penjelasan pasalnya sebagai berikut :

## BAB V

### PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

#### Pasal 20

(1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah

sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan pasal :

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah seperangkat pranata, prinsip, dan kondisi yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan dalam mengukur kinerja, baik moral maupun fisik dan sekaligus menunjukkan identitas dan jati diri yang bersangkutan.

Nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara, antara lain:

- a. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
- b. Nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Doktrin TNI.
- c. Nilai sebagai bangsa pejuang.
- d. Nilai gotong-royong.
- e. Nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Penjelasan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan tafsir resmi untuk memberikan keterangan terhadap suatu hal yang masih bersifat *debatable*. Bertolak dari penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tersebut menunjukkan adanya kesesuaian "nilai-nilai" yang dimaksud dalam pasal undang-undang *a quo* dengan apa yang terkandung dalam Doktrin Pertahanan Negara yang merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental yang digali dari nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu, dalam merebut, mempertahankan dan

mengisi kemerdekaan, yang merefleksikan nilai-nilai heroisme, patriotisme dan nasionalisme, serta terwujud dalam rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, dan rela berkorban. Nilai-nilai ini tercermin dari keterlibatan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia, sehingga sesuai dengan makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.

Penempatan dixi "nilai-nilai" dalam pasal 20 ayat (2) undang-undang *a quo*, termasuk lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang oleh pembentuk undang-undang bukan tanpa alasan, karena kedudukan Doktrin Pertahanan Negara yang merupakan bagian dari "nilai-nilai" tersebut begitu luhur sehingga layak untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### C. Penutup

1. Doktrin pertahanan negara merupakan suatu nilai luhur yang kedudukannya berada pada tingkatan strategis berskala nasional dalam hal pengelolaan sistem pertahanan negara.
2. Berdasarkan asas dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara belum tercapai karena belum sesuai dengan asas *beginsel van het juiste organ*, yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Selama ini regulasi terkait Doktrin Pertahanan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan, sehingga terkesan lingkup berlakunya peraturan tersebut hanya di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Oleh karena itu, sesuai penjelasan pasal 20 UU Nomor 3 tahun 2002 seharusnya Doktrin Pertahanan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga secara *mutatis mutandis* mengikat seluruh K/L, Pemda, dan seluruh elemen bangsa lainnya.\*\*\*

# MENGEMBANGKAN SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: drg. Pongki Sipahutar,Sp.KG

Analis Pertahanan Negara Madya Set Ditjen Kuathan Kemhan



Sumber foto : Biro Humas

## PENDAHULUAN

**P**ertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Permenhan No.24 tahun 2014). Dalam rangka melaksanakan Pertahanan Negara diperlukan konsep Pertahanan Negara.

Dalam konsep Pertahanan Negara harus ada Sistem Pertahanan Negara yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Salah satu ancaman tersebut adalah wabah yang merupakan bagian dari ancaman bidang kesehatan yang menjadi bagian integral dari Sistem Pertahanan Negara (Jakumhanneg No.8 tahun 2021). Dengan demikian Pertahanan Negara Bidang Kesehatan disebut Kesehatan Pertahanan Negara yaitu totalitas dari sumber

daya bidang kesehatan di wilayah Republik Indonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pertahanan Negara (Permenhan No.24 tahun 2014). Sistem Kesehatan Pertahanan Negara (Siskeshanneg) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia yang secara terpadu dan saling mendukung, sehingga menjadikan segenap unsur kesehatan mampu memberikan dukungan kesehatan bagi penyelenggaraan upaya pertahanan negara. (Permenhan 24 tahun 2014). Siskeshanneg merupakan bagian Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan

berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam Siskeshanneg terdapat beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan fungsi inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, mobilisasi dan demobilisasi kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya pertahanan negara yang tangguh.

Siskeshanneg terdiri dari seluruh komponen kesehatan, baik di daerah maupun di pusat, yang diselenggarakan dengan melibatkan semua komponen siskeshanneg baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Komponen Siskeshanneg tersebutdiri atas kesehatan TNI, kesehatan Pemerintah, kesehatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Permenhan No. 24 tahun 2014 tentang Siskeshanneg).

Berdasarkan Permenhan 24 tahun 2014, Siskeshanneg terbagi dalam subsistem, a. Sistem Informasi Geomedik, b. sumber daya manusia kesehatan, c. materiil Kesehatan, d. sarana dan prasarana kesehatan, e. teknologi kesehatan dan sumber daya alami, dan f. upaya kesehatan.

Bentuk penyelenggaraan pembinaan Siskeshanneg ditata secara terpadu meliputi: a. perencanaan strategis kesehatan pertahanan negara di tingkat pusat dan perencanaan taktis di tingkat daerah; b. pengorganisasian di tingkat pusat dan daerah; c. pelaksanaan upaya kesehatan pertahanan negara; dan d. pengawasan dan evaluasi.

Siskeshanneg menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembinaan kesehatan pertahanan negara yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Sekarang ini kita memasuki era digitalisasi dimana kita masih harus membangun Siskeshanneg yang kuat, tangguh dan solid. Hal itu untuk mengantisipasi ancaman yang multidimensi pada masa sekarang dan masa depan. Ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi hanya bersifat konvensional atau militer. Sejumlah kemungkinan yang sifatnya non militer atau kolaborasi keduanya dan bersifat multidimensi juga harus diantisipasi. Saat ini cara pandang sudah harus dimaknai dengan penuh kewaspadaan. Karena tidak bisa lagi menganggap

setiap ancaman terhadap negara hanya bersifat konvensional. Perkembangan teknologi informasi saat ini dinilai dapat mengaburkan batas geografis maupun administratif yang berdampak luas, termasuk pertahanan negara. Krisis multidimensi meliputi berbagai sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, bahkan hingga krisis informasi. Krisis multidimensi tidak hanya dialami oleh beberapa negara saja, namun seluruh negara di dunia merasakan krisis tersebut. Kesehatan miltir perlu dikembangkan lagi dengan mengutamakan kesehatan untuk Pertahanan Negara berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Sekarang kita memasuki era revolusi industri 4.0, pada era ini semua sudah berbasis komputer. Semua subsistem Siskeshanneg sebaiknya mulai diarahkan kepada sistem digital, mulai dari sub sistem geomedik hingga monitoring dan evaluasi. Untuk itu kita harus mulai dengan konsep baru membangun Siskeshanneg era digital. Mengembangkan Siskeshanneg merupakan pekerjaan besar yang memerlukan perencanaan matang dan dilakukan secara terintegrasi dan massif. Dengan konsep baru maka tujuan strategis yang diharapkan juga baru.

Kemampuan seorang prajurit (prajurit professional) merupakan suatu indikator yang sangat menentukan dalam keberhasilan membangun Siskeshanneg. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penggerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metoda) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014). Pembinaan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi, tidak dapat tercapai dalam masa yang dekat. Oleh karena itu perlu menetapkan tujuan strategis organisasi secara bertahap, perlunya tahapan (*milestone*) yang berkesinambungan agar tercapai tujuan strategis utama organisasi.

Dari uraian di atas maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana membangun sistem kesehatan pertahanan negara yang mampu mengatasi permasalahan bidang kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI pada era revolusi industri 4.0, serta peran strategis Kesehatan Kemhan dan TNI dalam menghadapi ancaman multi dimensi pada masa sekarang dan masa depan

## PERMASALAHAN

Dalam membangun Siskeshanneg pada era digitalisasi akan menemui berbagai permasalahan seperti bagaimana membangun sistem kesehatan pertahanan negara melalui suatu perencanaan yang baik di lingkungan Kemhan dan TNI, apakah organisasi yang ada sekarang cukup mampu untuk menghadapi permasalahan ancaman multidimensi pada masa sekarang dan masa depan, bagaimana upaya pelaksanaan kesehatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman multi dimensi, bagaimana pengawasan dan evaluasinya?

Dalam membahas masalah diatas penulis berusaha mengulas permasalahan tersebut melalui pendekatan perencanaan strategis, pendekatan pengorganisasian, pendekatan upaya pelaksanaan kesehatan pertahanan Negara, dan pengawasan dan Evaluasi.

## PEMBAHASAN

### PENDEKATAN PERENCANAAN STRATEGIS KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka prajurit TNI mempunyai tugas OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) (UU No.34 tahun 2004 tentang TNI). Dalam rangka OMP maka prajurit kesehatan TNI akan mendukung kegiatan dalam operasi militer perang, sedangkan dalam OMSP prajurit kesehatan TNI mendukung kegiatan operasi militer selain perang seperti penanggulangan bencana, menghadapi pandemik suatu penyakit. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Karena itulah dalam menghadapi ancaman bidang kesehatan tenaga kesehatan merupakan hal yang utama.

Perencanaan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan tugas. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses berpikir secara logis dan proses pengambilan keputusan rasional sebelum melaksanakan suatu tindakan. Hal tersebut akan membantu kita dalam



Sumber foto : Biro Humas

memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara yang baik dalam menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi di masa depan.

Dalam perencanaan strategis sistem kesehatan pertahanan Negara berdasarkan subsistem Siskeshanneg dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Sub Sistem Informasi Geomedik;**

Kita sekarang di dalam era revolusi industri 4.0, yang merupakan era digitalisasi. Siskeshanneg pada sub sistem geomedik sudah harus merencanakan digitalisasi sedini mungkin agar apa yang kita inginkan mengenai data kekuatan kesehatan dapat tersusun dengan baik, karena data kekuatan kesehatan menjadi landasan untuk membuat program atau kegiatan. Data ini akan memberikan semua gambaran mengenai kekuatan, kemampuan dan daya tahan dari Siskeshanneg. Membangun sistem informasi kesehatan terintegrasi merupakan langkah awal yang sulit tetapi harus dilakukan.

Membangun sistem informasi ini berarti kita membangun jaringan yang luas pada seluruh lingkungan Kemhan dan TNI. Sehingga kita akan membuat bigdatamengenai kekuatan, kemampuan dan daya tahan kesehatan secara terpadu, terukur dan terintegrasi. Ini dapat mempermudah penggerakan dan penyelenggaraan pasukan dalam mendukung tugas operasi militer secara cepat dan tepat serta terkoordinasi dengan baik. Dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi harus dilakukan dengan standard militer yang tinggi dengan mempunyai keunggulan komparatif dan kerahasiaan dapat terjaga.

Terkait pertahanan nirmiliter dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2021 tentang Jakumhanneg, bahwa Kesehatan TNI mendukung operasi militer selain perang, yang menjelaskan adanya kolaborasi sipil militer dalam penyelenggarannya. Dibutuhkan data sipil militer yang terintegrasi secara nasional untuk pertahanan nirmiliter bidang kesehatan. Untuk menggabungkan kedua data tersebut perlu dibentuk badan koordinasi pertahanan nirmiliter bidang kesehatan pada tingkat nasional. Hal ini karena terdapat data kesehatan yang tersebar luas di seluruh Indonesia baik swasta maupun pemerintah, tentunya menimbulkan kesulitan dalam koordinasi. Kementerian Pertahanan dapat menginisiasi terbentuknya badan koordinasi pertahanan nirmiliter bidang kesehatan secara nasional.

#### **Sumber daya manusia kesehatan;**

Sumber Daya Manusia Kesehatan Militer merupakan unsur penting dalam Siskeshanneg, oleh karena itu harus diciptakan SDM Kesehatan militer yang mempunyai kemampuan lebih. Dalam hal perencanaan membangun SDM Kesehatan militer yang tangguh perlu metode yang tepat melalui suatu pentahapan dimana setiap tahap harus dilalui dengan baik, hingga menuju tujuan utama. Membangun SDM Kesehatan militer yang tangguh dapat dilakukan dengan membangun fisik, mental, ideologi dan pengetahuan yang berbasis science. Penerapan science berupa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan. SDM Kesehatan militer pada era digital harus mempunyai intelektual yang tinggi, agar mudah merespon permasalahan yang dihadapi. Kemhan berperan penting dalam membentuk konsep pembangunan SDM Kesehatan militer melalui pendidikan peningkatan kapasitas yang berorientasi penguasaan IPTEK. Kementerian Pertahanan dapat menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan dengan membuat suatu kebijakan/regulasi, yang mengatur sebuah ukuran yang harus tercapai bagi SDM Kesehatan militer. Dengan kebijakan/regulasi maka dapat menghasilkan SDM Kesehatan militer yang diharapkan. Sampai saat ini masih banyak standard yang belum terpenuhi sehingga sulit mendapatkan SDM Kesehatan militer yang diharapkan. Salah satunya adalah SDM Kesehatan militer yang melek teknologi dan informasi. Konsep pengembangan SDM Kesehatan militer harus terus dikembangkan karena permasalahan kesehatan militer terus berkembang.

Dalam menghadapi ancaman bidang kesehatan yang sulit terdeteksi di masa depan maka konsep pengembangan intelijen medis merupakan salah satu yang urgent. Intelijen medis adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang kesehatan (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013). Intelijen medis akan senantiasa bergerak untuk mengantisipasi ancaman di depan. Pengembangan SDM kesehatan untuk intelijen medis merupakan skala prioritas yang utama, karena informasi strategis yang dapat merupakan awal dalam pengembangan Siskeshanneg ke depan.

## Materiil Kesehatan

Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Permenhan RI Nomor 12 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI). Banyak permasalahan materiil kesehatan yang ada, apakah semua materiil kesehatan terdata? apakah materiil kesehatan terpakai secara baik? apakah materiil kesehatan terpenuhi semua? apakah materiil kesehatan dapat memenuhi kebutuhan prajurit? apakah materiil kesehatan sudah terstandardisasi dengan baik? untuk itu perlu dilakukan telaah yang lebih mendalam.

Permasalahan materiil kesehatan sangat berhubungan dengan industri materiil kesehatan, karena materiil kesehatan itu dihasilkan dari industri. Perlu menjadi perhatian sekarang untuk mengembangkan atau membuat baru sebuah industri materiil kesehatan. Perlu regulasi yang mengatur industri materiil bidang kesehatan. Kemhan harus dapat membuat regulasi tersebut. Diperlukan konsep mengenai pengembangan industri bidang kesehatan untuk pertahanan

negara. Melakukan digitalisasi materiil kesehatan merupakan langkah penting dalam membangun Siskeshanneg yang tangguh. Dengan digitalisasi ini maka permasalahan yang ada terkait penggolongan, pengolahan, pendistribusian, pengujian dan pembinaan materiil dapat terselesaikan. Dengan industri bidang kesehatan yang kuat dan mandiri maka ancaman multi dimensi dapat di atasi.

## Sarana dan prasarana kesehatan;

Perencanaan strategis mempersiapkan rumah sakit militer yang mandiri dan tangguh merupakan hal utama dalam membangun Siskeshanneg. Rumah sakit militer yang di miliki Kemhan dan TNI harus mempunyai kehaxian tersendiri terkait kemampuan dalam mendukung operasi militer. Kemhan dapat membuat konsep standard rumah sakit militer tinggi, sesuai dengan tugas pokoknya. Selain mendukung operasional militer, rumah sakit Kemhan juga harus mampu memberi pelayanan kepada keluarganya dan memanfaatkan fasilitasnya untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Rumah sakit militer harus mempunyai kemampuan mengatasi kesehatan bagi prajurit dalam operasi militer dan juga ditujukan untuk menghadapi ancaman bidang kesehatan yang



Sumber foto : Biro Humas

semakin luas dan sulit diprediksi, maka fasilitas rumah sakit militer perlu dilengkapi secara utuh. Sebagai basis kekuatan dalam siskeshanneg rumah sakit militer juga mempunyai kemampuan untuk mendeteksi ancaman yang akan terjadi, melalui pengembangan peralatan modern berbasis teknologi tinggi. Sarana dan prasarana yang menunjang rumah sakit militer harus juga disesuaikan dengan kebutuhannya.

Membangun rumah sakit berstandard militer tinggi dan fasilitas yang canggih merupakan skala prioritas yang diharapkan. Selain rumah sakit militer tentu juga rumah sakit lapangan menjadi prioritas pengembangan, karena dalam pelaksanaan tugas operasi militer rumah sakit lapangan dapat dioperasikan dalam posisi dimanapun. Memasuki era digitalisasi maka rumah sakit militer diharapkan terkoneksi mulai dari pusat hingga daerah, hal ini akan mempermudah dalam pengkoordinasian terkait penggerakan dan penyelenggaraan kesehatan militer di lingkungan Kemhan dan TNI.

Rumah sakit Kemhan dan TNI sebagai benteng terdepan menghadapi ancaman multi dimensi, diharapkan dapat dikembangkan sebagai *Health Security Center (HSC)*. HSC menjadi awal tarik ulur problematika keamanan kesehatan Indonesia, yang merambah area dimensi nasional dan regional negara. Kondisi ini menuntut suatu spirit baru bagi negara, untuk meredefinisi kembali peran dan fungsi ketahanan nasionalnya dalam bidang kesehatan. HSC tidak hanya berkutat di bidang infeksi, namun situasi global politik, ekonomi, migrasi serta perubahan iklim mewarnai struktur Keamanan Kesehatan Negara (*National Health Security*), sehingga negara harus dapat mengupayakan dan merumuskan kembali fungsi *rapid, detect, prevent* dan *respond*-nya berdasarkan karakteristik peta geomedik dan kekuatan partisipasi masyarakatnya sebagai kekuatan ketahanan nasional.

#### Teknologi kesehatan dan sumber daya alami

Membangun kesehatan militer berteknologi tinggi merupakan tujuan utama membangun Siskeshanneg. Segala subsistem Siskeshanneg harus mampu beradaptasi pada teknologi tinggi yang dapat diterapkan mulai dari sistem administrasi sampai pada pelaksanaan tugas di lapangan.

Era revolusi industri 4.0 mengharuskan siskeshanneg dibangun dengan terapan teknologi canggih. Pendekatan ancaman yang

sulit terdeteksi dapat diatasi. Perlu konsep dalam menerapkan teknologi dalam membangun Siskeshanneg. Pemanfaatan sumber daya alami akan lebih mudah dengan menggunakan teknologi canggih. Kita dapat mengolah sumber daya alami untuk kepentingan pertahanan negara.

#### PENDEKATAN PENGORGANISASIAN

Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024(Perpres Nomor 8 Tahun 2021), dinyatakan bahwa berdasarkan perkembangan lingkungan strategis maka dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan pertahanan. Prediksi ancaman nyata sewaktu-waktu bisa terjadi dan dapat dikategorikan menjadi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Dalam menghadapi ancaman di bidang kesehatan diperlukan sistem kesehatan pertahanan yang tangguh. Pertahanan kesehatan yang tangguh berarti dapat menghadapi berbagai macam ancaman di bidang kesehatan.

Mencermati ancaman yang sudah ada dan akan timbul pada masa sekarang dan akan datang, organisasi sekarang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan strategis. Organisasi sekarang harus menambah fungsi baru dengan melakukan perubahan organisasi. Pengembangan organisasi kesehatan tentu akan terus mengalami perubahan karena ancamannya sudah multi dimensi. Membangun Siskeshanneg harus disesuaikan dengan ancamannya. Dengan ancaman multi dimensi maka fungsi yang belum ada harus ditimbulkan atau dengan kata lain fungsi fungsi baru harus ditambahkan.

Perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional yang sangat cepat dan penuh dinamika menuntut perlunya perubahan strategi di Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan, diikuti dengan pengembangan organisasi. Negara bahkan dunia sedang menghadapi pandemi covid-19 yang telah menimbulkan korban yang banyak dan menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Dengan situasi ini kita dipaksa harus melakukan perubahan dari kondisi lama. Kita memerlukan strategi baru dalam menghadapi ancaman di masa depan.

Pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan/atau memungkinkan organisasi dalam membuat



Sumber foto : PT Palindo

sasaran strategis baru. Pengembangan organisasi bisa dilakukan sebagai strategi untuk penguatan, penataan, dan penyesuaian organisasi, sehingga mampu meningkatkan kemampuan organisasi dan efektifitas kinerja. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi sekarang dan proyeksi akan timbulnya permasalahan kesehatan di masa depan maka pengembangan organisasi merupakan skala prioritas pada Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan.

Banyak manfaat yang diberikan dengan adanya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi akan menciptakan suatu pola peningkatan yang konstan, dimana penggunaan strategi pengembangan organisasi dikembangkan, dievaluasi, diimplementasikan, dan dinilai kualitasnya. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi lebih baik terhadap perubahan dan kemajuan teknologi serta ancaman multi dimensi. Pengembangan organisasi juga menjadi alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan organisasi.

Dalam melakukan pengembangan organisasi diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Langkah penataan fungsi-fungsi dalam organisasi Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan dilakukan dengan beberapa hal, antara lain Integrasi Unit kerja kesehatan yang ada di Kemhan, pengembangan (penambahan)

fungsi baru, peningkatan efektivitas fungsi, menggabungkan (*merger*) fungsi dalam Unit Kerja dan masih banyak metode yang dapat digunakan untuk pengembangan organisasi.

#### PENDEKATAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasи dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. (UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

Kemhan mengatur regulasi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan militer dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan militer. Secara umum upaya kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam upaya kesehatan sesuai dengan Permenhan RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standardisasi Tenaga Kesehatan Preventif di Lingkungan Kemhan dan TNI maka tugas tenaga kesehatan preventif menyelenggarakan upaya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dalam: OMP, OMSP, daerah latihan, fasilitas kesehatan dan markas satuan/pangkalan.

Upaya tersebut berupa pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI telah dilaksanakan secara baik, dilakukan terhadap individu, lingkungan rumah tangga dan satuan atau pangkalan.

Dalam mendukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya maka Kemhan dan TNI bersatu padu mensukseskan pelayanan kesehatan sesuai dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan telah menyatukan cara memberi pelayanan kesehatan yang sudah di standardisasi tingkat nasional. Seluruh prajurit TNI dan keluarganya merupakan anggota BPJS kesehatan yang jelas cara pelayanannya.

## PENDEKATAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

Kegiatan pengawasan pada dasarnya memiliki peran untuk membandingkan akan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan/hambatan/penyelewengan dapat segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen. Terry dan Leslie juga menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan apa yang diharapkan (*goal and objectives*) serta mengambil tindakan yang perlu (Terry, George R. dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)). Suharismi dan Safrudin berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan (Arikunto Suharsimi, Dan Cepi Safrudin. Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)). Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah dicapai sehingga diperoleh informasi nilai atau manfaat suatu subjek evaluasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam alternatif pengambilan suatu keputusan (Terry, George R. dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)).

Setelah perencanaan sistem kesehatan Pertahanan Negara yang baru di rancang dan dilaksanakan maka perlu dilakukan pengawasan

dan evaluasi. Pengawasan untuk melihat apakah sistem kesehatan Pertahanan Negara yang baru tersebut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Bila terjadi hambatan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan tersebut.

## PENUTUP

Dari uraian membangun Siskeshanneg dalam Era Revolusi Industri 4.0 maka subsistem siskeshanneg harus mengalami pengembangan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, sehingga dalam melaksanakan tugas OMP dan OMSP dapat mengatasi ancaman multidimensi.

## KESIMPULAN

*Pertama*, mengembangkan Sistem Kesehatan Pertahanan Negara pada era Revolusi Industri 4.0 dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu pendekatan perencanaan strategis kesehatan pertahanan negara, pengorganisasian, pelaksanaan upaya kesehatan pertahanan negara, serta pendekatan pengawasan dan evaluasi

*Kedua*, mengembangkan sistem Kesehatan Pertahanan Negara harus melalui pentahapan (*milestone*) yang baik sehingga tujuan utama yaitu sistem kesehatan pertahanan negara yang tangguh dapat tercapai.

*Ketiga*, Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling utama dalam Siskeshanneg yang berperan menjaga kestabilan dan keberlanjutan (*sustainable*) pengembangan Siskeshanneg.

*Keempat*, pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan ancaman bidang kesehatan.

## REKOMENDASI

*Pertama*, Kemhan dalam hal ini Ditjen Kuathan Kemhan harus mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi canggih dalam mengembangkan Sistem Kesehatan Pertahanan Negara.

*Kedua*, pengembangan organisasi dapat dilakukan sesegera mungkin agar permasalahan siskeshanneg dapat diatasi\*\*\*



• • • • •



Dalam rangkaian kegiatan G20 berlangsung Seminar internasional di Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri sejumlah delegasi perwakilan negara-negara seperti Perancis, India, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Belanda, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol dan Turki. Seminar yang digelar tanggal 7-9 September 2022 mengusung tema, "Harnessing The Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia". Seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan negara-negara G20 dengan tujuan untuk mempererat kerjasama antara industri kedirgantaraan di Indonesia dengan pemerintah dan Industri baik dalam dan luar negeri serta akademisi. Dalam seminar ini juga berlangsung penandatanganan MoU kerja sama antara Airbus Defence and Space dan Airbus Helicopters dengan PTDI atas produksi komponen aerostruktur helikopter dan pesawat militer PTDI.\*\*\*

Sekitar 100 orang Pramuka Penggalang yang terlibat dalam Jambore Nasional (Jamnas) Gerakan Pramuka XI tahun 2022 mengunjungi Kementerian Pertahanan RI dalam rangka untuk meningkatkan wawasan tentang Kementerian/Lembaga serta meningkatkan kemandirian dan keterampilan sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) Setjen Kemhan Brigjen TNI Kosasih menerima Peserta Wisata Edukasi Jamnas di Kemhan dengan mengajak berkeliling Kemhan serta memperkenalkan satuan kerja dibawah Kemhan, Senin (15/8).\*\*\*





Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kapusrehab Kemhan) Brigjen TNI dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp. RAD secara resmi membuka turnamen tenis kursi roda Kapusrehab Cup XV tahun 2022 di lapangan tenis Pendopo Pemda Kabupaten Bogor, Cibinong Jawa Barat, Selasa (23/8). Turnamen tenis kursi roda yang berlangsung satu hari ini diikuti atlet tenis kursi roda yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) se-Indonesia. Turnamen ini sebagai ajang pelatihan bagi atlet-atlet tenis kursi roda yang akan bertanding pada pekan *Paralympic* Nasional yang akan datang\*\*\*.



• • • • • • •



Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Taufiq Shobri memimpin pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan urin bagi personel Biro Humas Setjen Kemhan, di Kemhan, Jakarta, Senin (19/9). Pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan anggota Biro Humas khususnya dalam hal pencegahan penggunaan obat psikotropika. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa seluruh pegawai Biro Humas Setjen Kemhan yang diperiksa dinyatakan negatif dan tidak ditemukan indikasi adanya pemakaian zat psikotropika\*\*\*.





Bertepatan dengan hari bersejarah dan membanggakan bagi seluruh keluarga besar TNI yaitu Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tanggal 5 Oktober 2022, Sekjen Kemhan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto melepas 22(dua puluh dua) personel Kemhan yang memasuki masa purna bakti. Mereka terdiri 9(sembilan) personel TNI dan 13 (tiga belas) personel PNS. Sebelumnya, pada hari dan tempat yang sama di lapangan Bela Negara Kemhan berlangsung upacara peringatan HUT TNI ke-77 dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekjen Kemhan.\*\*\*



• • • • •



Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto dengan didampingi Ketua DWP Setjen Kemhan Ny. Yayuk Donny Ermawan menghadiri peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1444 H/2022 M di Masjid At-Taqwa Kemhan, Rabu (3/8). Peringatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan secara tatap muka setelah pandemi covid-19. Tema yang diangkat yaitu, "Dengan Semangat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram Tahun 1444 H / 2022 M, Kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT untuk mewujudkan pegawai Kemhan yang disiplin dan profesional". Tema ini mengandung makna agar pegawai Kemhan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai dasar untuk membentuk karakter yang unggul sebagai roda penggerak organisasi. Adapun karakter yang dimaksud adalah religius, disiplin, profesional, loyalitas serta bertanggung jawab.\*\*\*





# INDO DEFENCE 2022 EXPO & FORUM

incorporating with

INDO  
AEROSPACE  
2022 EXPO & FORUM

INDO MARINE  
2022 EXPO &  
FORUM

THE 9<sup>th</sup> INDONESIA'S OFFICIAL TRI-SERVICE DEFENCE,  
AEROSPACE, MARITIME, AND SECURITY EVENT  
**"PEACE, PROSPERITY, STRONG DEFENCE"**

2 - 5 NOVEMBER 2022

JIEXPO KEMAYORAN, JAKARTA - INDONESIA

SCAN ME  
to Visit



<https://visitorreg.id/q/IDD22>

3 - 4 NOVEMBER 2022

AIRCRAFT DISPLAY | HALIM PK SOUTH APRON\*

NAVAL SHIP DISPLAY | PONDOK DAYUNG DOCK\*

\*Terms and Conditions are applied. Registration and accommodation available only at JIExpo. Bus will wait at JIExpo's parking area and will directly enroute to JIExpo.

SUPPORTED BY



KNOWLEDGE PARTNER



OFFICIAL AND EXCLUSIVE  
SHOW DAILY



MEMBER OF



Indo Defence Expo & Forum

@IndoDefence

@Indo\_Defence

info@indodefence.com

[www.indodefence.com](http://www.indodefence.com)





# DETERMINE THE 2022 TNI RESERVE COMPONENT



EDITION III/2022

EISSN 1943-0211



ENGLISH



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan  
Republik Indonesia



@Kemhan\_RI



berkemhan



Kemhan RI





Dear Wira Readers,

Praise and gratitude we pray to the presence of Allah SWT the God Almighty because of His blessing, at the end of 2022, the editorial team of WIRA Magazine can again present many different interesting information to loyal WIRA readers about the world of defense which is presented in the form of news, photos and infographics.

A number of news and photos related to the activities of the Head of the Ministry of Defense both at home and abroad have been summarized and presented in the Leadership Focus rubric.

This edition of WIRA, interestingly presenting four articles written directly by experts in their fields that raise various current issues regarding the Achievements of the Indonesian Defense University Towards a World Class Defense University, Management of the Indonesian Peace and Security Center (IPSC) Area with an eco-green concept, Juridical Review of the Legal Position of State Defense Doctrine and Developing the State Defense Health System in the Era of the Industrial Revolution 4.0.

For the improvement and progress of WIRA magazine in the future, we are open and welcome criticism, suggestions and input from loyal WIRA readers which can be sent to WIRA editors at the Public Relations Bureau of the Director General of The Ministry of Defense, Infopublikta Section, A.H Nasution Building. 9th Floor or can be via email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed through Kemhan web at [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)

Finally, please enjoy reading the third edition of WIRA magazine 2022.

State Defense greetings.

Head of Public Relations Bureau,

Brig. Gen. TNI Taufiq Shobri, M.Han

## EDITORIAL TEAM

**Advisor:** Secretary General of MoD/Air Marshal TNI Donny Ermawan T, M.D.S. - **Editor in Chief:** Head of Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD/Brig. Gen TNI Taufiq Shobri, M.Han. - **Managing Editor:** Chief of Public Information and Library of Public Relation Bureau of The Sec. Gen of MoD/ Col. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si. - **Editors:** Endang Rahayu, S.Sos, M.AP. - **Graphic Designer:** Imam Rosyadi. - **Photo:** Photografers of Public Relations Bureau. - **Distribution Staff:** Mandiri Triadi, S.Sos./Captain Lindu Baliyanto.. - **Published by:** Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

# Contents

## Main Focus>>

Minister of Defense Accompanies the Vice President of the Republic of Indonesia to Determine the 2022 TNI Reserve Component

6



In order to implement Indonesia's state defense system which is universal and involves all national resources, the reserve component (komcad) as part of national resources that needs to be built, maintained and developed so that its readiness can be realized so that it can be used to increase the strength and capabilities of the main components.

## Leaderships Focus >>

Minister of Defense Prabowo and Minister of Defense of Malaysia Sign Memorandum of Understanding on Defense of the Republic of Indonesia – Malaysia

9

Minister of Defense Prabowo Subianto Receives Four Meritorious Military Order Stars from the Government of Indonesia

11

Witnessed by President Jokowi, Minister of Defense Prabowo Handed Over Motorcycles to Kodim 1503 / Tual Maluku

13

F-16 Fighter Aircraft Attractions Celebrate the 77th Anniversary of the TNI Anniversary

15

Vice Minister of the Republic of Indonesia Fully Supports the Defense Cooperation of the Republic of Indonesia – Singapore

16

Vice Minister of Defense of the Republic of Indonesia M. Herindra Attends ASEAN – RoK Defense Vice-Ministerial Meeting

17

**Secretary-General Inaugurates The PPID Room of the Ministry of Defense**

**18**

**The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia Celebrated the 77th Anniversary of the Republic of Indonesia by Holding a Special Competition on August 17**

**19**

**Ministry of Defense Enlivens the 27th National Technology Awakening Day by Holding the R&D Week**

**20**

## **Article>>**

**Achievements of the Indonesian Defense University Towards World Class Defense University**

**21**

(writer: Vice Admiral TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng)

**Indonesia Peace And Security Center (IPSC) Area Management With Eco-Green Concept** (writer: Brig gen TNI Sudaryanto,S.E.)

**26**

**Juridical Review of the Legal Position Doctrine of State Defense**  
(writer: Navy Col (K) TNI Dr. Steven T. Sambouw, S.H., S.Kep., M.H., M.A.P.)

**32**

**Developing the Country Defense Health System in the Industrial Revolution 4.0 Era** (writer: drg. Pongki Sipahutar,Sp.KG)

**37**

**49**



**Fokus Lensa>>**





# MINISTER OF DEFENSE ACCOMPANIES THE VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO DETERMINE **THE 2022 TNI RESERVE COMPONENT**

Oleh : Editorial Team

**I**n order to implement Indonesia's state defense system which is universal and involves all national resources, the reserve component (komcad) as part of national resources that needs to be built, maintained and developed so that its readiness can be realized so that it can be used to increase the strength and capabilities of the main components.

Referring to Law Number 3 of 2002 concerning State Defense and Law Number 23 of 2019 concerning to the Management of National Resources for State Defense, mandates the Establishment of a Reserve Component of the citizen element, the implementation of which is through the stages of registration, selection, basic military training and determination. The reserve component is a national resource that is prepared to be deployed through mobilization to enlarge and strengthen TNI as the main component, which is carried out by the President with the approval of the DPR RI for the benefit of state defense.

Observing the current state of readiness of the reserve component faced with the nature of threats as a result of the rapidly changing strategic environment, the realization of the reserve component consisting of human resources, natural resources, artificial resources and infrastructure is a must.

## Establishment of the State Defense Reserve Components

A total of 2,974 people are currently members of the State Defense Reserve Component which is divided into five battalions and trained in three services namely The Army, The Navy and The Air

Force. The training was spread across Regional Training Regiment (Rindam) in Indonesia, there are 450 people in Rindam II / Sriwijaya, 500 people in Rindam VI / Mulawarman and 500 people in Rindam XIV / Hasanuddin. Then 499 people in Marine Education Command (Kodikmar) Surabaya, 500 people at Education and Training Centre for the Rapid Movement Command (Pusdiklat Kopasgat), Bandung and 50 women trained at The Women's Army Corps Education Centre (Pusdik Kowad) as well as 475 Unhan Cadets in Unhan RI

In his report while accompanying the Vice President of the Republic of Indonesia K.H. Ma'ruf Amin in the ceremony of determining the the country's defense reserves components of at Suparlan Airfield, The Center for Education and Training of Special Forces (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, West Java, Thursday (8/9), Minister Prabowo conveyed the process of forming the Reserve Component FY 2022.

Starting from the voluntary registration process on March 1 - May 8, 2022, the selection stage is May 9-27, 2022, then the Military Basic Training Education (Latsarmil) may 30 - August 27, 2022 and the determination on September 8, 2022 at the Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, West Java.

In addition to being trained in the military, comcad trainees are also trained in rifles, self-defense, unloading weapons, fly passes of Air Force aircraft, the ability to break hard objects, parko and block gymnastics. This ability was demonstrated in the demonstration of agility in the presence of the Vice President, Minister of Defense and invited guests who were present at the determination ceremony of Reserve Component FY 2022. All participants seem to be swift and agile to show their abilities.



Photo Source : PR Bereau

## Vice President's Message to Reserve Component Trainees.

Potential threats to the sovereignty, integrity, and safety of the nation can come from within or outside the country. For this reason, strong social capital is needed for all elements of society to maintain the unity of the nation in the midst of the turmoil that occurs.

There are four steps that can be taken in cultivating social capital, as follows: first, the Reserve Component defense training to be designed in a broad perspective, combining conventional defense patterns and non-traditional threats. The mindset in maintaining the unity of the state is not only in the perspective of weapons. But more broadly, it can be done in digital based.

Second, it is necessary to develop an optimistic narrative in public communication related to the role and function of the Reserve Component, so that the collective consciousness of all the nation emerges to take part in efforts to defend the state that can be realized in various forms. Through

this awareness, Indonesia's strength will be even greater in defending the sovereignty of the nation and realizing an Advanced Indonesia.

Third, the promotion of state defense in the younger generation requires innovative breakthroughs. This can be done by developing creative and contemporary training so that the state defense program is effective in reaching various target groups.

And finally, after completing the training, members of the Reserve Component keep their mandate as a Reserve Component while continuing to be an inspiration for defending the country for the community. The Vice President hopes that the komcad training participants who have now completed the training, can return to their respective places and continue to carry out the mandate that has been obtained well in social life.\*\*\*



Photo Source : PR Bereau



DISEMPURNAKAN OLEH

PENGERUSI BERSAMA MESYUARAT/SIDANG KE-42 GENERAL BORDER COMMITTEE

9 OGOS 2022, KUALA LUMPUR



Photo Source : KBRI Malaysia

## MINISTER OF DEFENSE PRABOWO AND MINISTER OF DEFENSE OF MALAYSIA SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA - MALAYSIA

The 42nd General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) session held in Kuala Lumpur, Malaysia took place from 8 to 10 August 2022 co-chaired by the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto and the Minister of Right Defense of Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein Malaysia.

The GBC Malindo session, which in 2022 has entered the age of 50 years, the two Ministers of Defense, Tuesday (9/8), signed a Memorandum of Understanding in the field of defense cooperation which raised a number of important agendas in the field of operations and non-operations. Areas of operations include intelligence, land, sea, air, maritime, communications and electronics operations, search and rescue and police.

Meanwhile, the non-operations areas include the construction of cross-border posts, the exchange of trainers and joint military exercises of

the two countries as well as the establishment of an agreement on the addition of new joint posts, in order to improve better coordination between the two countries.

For Indonesia, as Minister Prabowo said, Malaysia and Indonesia have a special relationship. The Indonesian government welcomes any efforts to further strengthen Indonesia's relations with Malaysia, as well as closer cooperation in all fields. The cooperation includes periodic bilateral dialogues and consultations on strategic issues related to defense and military of common

1972

2022



Menteri Pertahanan RI Maraden Panggabean dan  
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Wakil Perdana  
Menteri ke-2 Malaysia Tun Dr Ismail bin Abdul Rahman



Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan  
Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri  
Hishammuddin bin Hussein

interest, sharing strategic information in the field of defense in symposia, seminars and study visits, as well as military cooperation in various fields between the Armed Forces.

*In addition, it is also the cooperation of personnel exchange, education, exercises, and logistical support, defense science and technology cooperation, defense*

*industry cooperation and defense cooperation in other forms that are jointly decided.*

*"I am grateful, I signed a very strategic MoU today. Hopefully what we're working on now, 50 years later, it will still have benefits," said Minister Prabowo.\*\*\**



Photo Source : KBRI Malaysia

# MINISTER OF DEFENSE PRABOWO SUBIANTO RECEIVES FOUR MERITORIOUS MILITARY ORDER STARS FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA

**T**he Indonesian government conferred Four Honors on Defense Minister Prabowo Subianto. The Honorary Stars was pinned by the Commander of the TNI and three Chiefs of Staff of the Force to Minister of Defense Prabowo Subianto in a ceremony to confer the Honorary Ribbon at the Silent Room, Kemhan, Jakarta, Monday (15/8). The four honorary stars are Grand Meritorious Military Order Star (Bintang Yudha Dharma Utama), Army Meritorious Service Star (Bintang Kartika Eka Paksi Utama), Navy Meritorious Service Star (Bintang Jalasena Utama) and Air Force Meritorious Service Star (Bintang Swa Bhawana Paksa Utama)

## 1. Grand Meritorious Military Order Star



Menhan Prabowo Subianto received the Honorary Yudha Dharma Utama Star based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 13 / TK / Year 2022 concerning the Awarding of the Honorary Yudha Dharma Utama Star. The Government of Indonesia awarded the Honorary Yudha Dharma Utama Star to the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto as a tribute to Indonesian citizens who are not members of the TNI or TNI Civil Servants who have contributed greatly in the field of TNI development with the results that are truly felt by the Government and the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The Honorary star was pinned by the Commander of the TNI, General TNI Andika Perkasa.

## 2. Army Meritorious Service Star



The Honorary Sign of Kartika Eka Paksi Star was given by the Indonesian government to Minister of Defense Prabowo Subianto based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 129 / TK / Year 2019 concerning the Awarding of the Honorary Sign of Kartika Eka Paksi Star. The Honorary Kartika Eka Paksi Star is given as a form of appreciation to members of the Army who in the field of military duties demonstrate extraordinary ability, wisdom and service beyond the call of obligation for the advancement and development of the Army who are of extraordinary merit for the progress and development of the Army. The Honorary Star was pinned by the Chief of Staff of the Indonesian Army, General Dudung Abdurrahman.

## 3. Navy Meritorious Service Star



The Government of Indonesia awarded the Honorary Sign Jalasena Utama Star to Minister Prabowo based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 4 / TK / Year 2022 concerning the Awarding of the Honorary Jalasena Utama Star. This Star is given as an award to Indonesian citizens who are not members of the Navy who have made extraordinary contributions to the progress and development of the Navy. The Honorary Star was pinned by the Chief of Staff of the Indonesian Navy, Admiral Yudo Margono.

#### 4. Air Force Meritorious Service Star



The Honorary Sign of Swa Bhawana Paksa Utama Star was given by the Indonesian government to Minister of Defense Prabowo Subianto as a tribute to Indonesian Citizens (WNI) who are not members of the Air Force who have made outstanding contributions to the progress and development of the Air Force. The Honorary Sign of Swa Bhawana Paksa Utama Star was given to Minister of Defense Prabowo based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 5 /TK/Year2022 concerning the Awarding of the Honorary Star of Swa Bhawana Paksa Utama. The Honorary Star was pinned by the Chief of Staff of the Air Force, Marshal TNI Fadjar Prasetyo.\*\*\*



Photo Source : PR Bureau



Photo Source : BPMI Setpres

## WITNESSED BY PRESIDENT JOKOWI, MINISTER OF DEFENSE PRABOWO HANDED OVER MOTORCYCLES TO KODIM 1503 / TUAL MALUKU

Minister of Defense Prabowo Subianto witnessed by President Joko Widodo handing over 40 units of motorcycles from the Ministry of Defense to Military District Command (Kodim)1503 / Tual Southeast Maluku in a series of working visits to Maluku Province, Wednesday (14/9).

Motor vehicles will be given to Village Advisory Officers (Babinsa) throughout Indonesia which is part of President Jokowi's direction to develop a long-term defense plan. The motor vehicles provided are local productions that will be made by domestic companies PT Pindad and PT LEN under the defense industry holding, defend ID.

"The construction and development of territorial strength is one of the very important elements, so we will empower all Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, and Kodam. So that's in our big plan, part of the defense of the country whose system is hankamrata (defense of the security of the people)," the Minister said. \*\*\*



Dok. BPMI Setpres

Photo Source : BPMI Setpres



S Photo Source : BPMI Setpres

**H**elicopter attractions carrying giant red and white flags and also fly pass attractions of TNI fighters adorn the sky of the capital Jakarta to celebrate the 77th anniversary of the Anniversary of the Indonesian Armed Forces (TNI), Wednesday (5/10). Starting with the flypass formation of 8 (eight) F-16 Fighting Falcon fighters which have the ability to carry out air battles against the air (air to air) or air versus the ground (air to ground).

The attraction was followed by the appearance of helicopter aircraft from three dimensions carrying giant red and white flags measuring 20 meters by 30 meters. The flag was carried by the EC-725 Caracal and NAS-332 Super Puma Helicopters followed by ah-64 E Apache Helicopters from the Indonesian Army and the Navy's US-565 Phanter Helicopters.

Attractions closed with the appearance of the jupiter team,called the Air Force acrobatic forces. The series of attractions alternately crossed the sky of the Merdeka Palace and was witnessed directly by President Joko Widodo along with the Minister of Defense and other invited guests.

In addition, a number of defense equipment were also exhibited at the 77th Anniversary of the TNI, including the French-made Multipurpose Combat Vehicle which is able to fire up to a distance of 6.5 km, the French-made MCP Mistral radar tool which has technical specifications up to a radius of 30,000 meters and the 155 mm Caesar gun which has a firing range of up to 39 km. There is also the Swiss-made Derlikon Skyshield which is a short-term air strike countermeasures vehicle, and the Czechoslovak MLRS RM 70 Vampire which has a firing range of up to 20 kilometers and the P6 Atay, Komodo, and Bushmaster.

Previously, there was a ceremony to commemorate the 77th Anniversary of the TNI in the courtyard of the Jakarta State Palace which was attended by the Vice President of the Republic of Indonesia, Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto, Commander of the TNI and Chief of Staff of the Force and Chief of Police. Indonesian President Joko Widodo acted

as Inspector of Ceremonies while the Ceremonial Officer was Brig. Gen. TNI Novi Helmy Prasetya.

In the commemoration which carries the theme "TNI is Us" the President expressed his highest appreciation for the role and hard work of all ranks of the TNI in maintaining the sovereignty of the nation and protecting the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution and protecting all Indonesian blood spills.\*\*\*



Photo Source : BPMI Setpres



Photo Source : PR Bereau

## VICE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FULLY SUPPORTS THE DEFENSE COOPERATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA – SINGAPORE

The Ministry of Defence, Armed Forces (TNI) and Armed Forces of the Republic of Singapore share the same vision to improve the relationship that has been established in a better direction. In recent times the intensity of interaction and communication between the two countries has shown an improvement in the quality of better cooperation.

Given the geographical location of Indonesia and Singapore, whose waters are traffic-heavy areas, it requires the two countries to maximize the development of their naval cooperation as outlined in the Navy to Navy Talks Forum. As is known, Indonesia and Singapore have signed a Defense Cooperation Agreement on January 25, 2022 which is in the process of ratification.

This was revealed when Vice Minister of Defense of the Republic of Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra received an honorary visit from the Chief of Navy of the Republic of Singapore

Rear Admiral (RADM) Aaron Beng accompanied by the Chief of Staff of the Indonesian Navy Admiral Yudo Margono and a delegation at the Ministry of Defense, Jakarta, Thursday (18/8).

"Ministry of Defense of the Republic of Indonesia fully supports the strong defense cooperation between Indonesia and Singapore, which is built on the principles of equality, mutual benefit and respect for sovereignty, territorial integrity and international law," said the Vice Minister of Defense of the Republic of Indonesia.\*\*\*

## VICE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA M. HERINDRA ATTENDS ASEAN – ROK DEFENSE VICE-MINISTERIAL MEETING



Photo Source : Personal Doc of Vice Minister

Vice Minister of Defense of the Republic of Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra attended the ASEAN-Republic of Korea Defense Vice-Ministerial Meeting (DVMM), in Seoul, South Korea.

The meeting, which was held on September 6-7, 2022, was officially opened by deputy minister of national defense of the Republic of Korea Y.M. Shin Beom Chul, Tuesday (6/9).

The topic raised in the meeting held annually since 2017 is, "Measures for the Development of RoK ASEAN Defense Cooperation for the Peace and Prosperity of the Region".

As one of ASEAN's speech partners, at the meeting the Republic of Korea (RoK) together with ASEAN countries exchanged views regarding the security situation in the region and the implementation plan for RoK and ASEAN defense cooperation as well as the achievements of cooperation that have been established.\*\*\*

# SECRETARY-GENERAL INAUGURATES THE PPID ROOM OF THE MINISTRY OF DEFENSE



Photo Source : PR Bereau



Secretary General of the Ministry of Defense Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto accompanied by the Director of Defense Technology and Industry of the Directorate General of Defense Potential of the Ministry of Defense (Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan), Head of the Public Relations Bureau of the Setjen Kemhan and Head of the Bureau of Organization and Governance of the Directorate General of Defense inaugurated the Information and Documentation Management Officer Room of the Ministry of Defense (PPID Kemhan), in Kemhan, Jakarta, Tuesday (13/9). The inauguration of the PPID Room was marked by the signing of an inscription by the Secretary General of the Ministry of Defense. Previously, Karo Humas Brigadier General TNI Taufiq Shobri, as the Head PPI, explained about the readiness of public information service facilities and alpalhankam licensing services in the context of assessment and evaluation at the ministry or institution level. Also submitted were the results of the assessment of the BPK RI Unqualified Opinion (WTP) against the Satker of the Public Relations Bureau of the Setjen Kemhan.\*\*\*

## THE SECRETARY GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CELEBRATED THE 77TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY HOLDING A SPECIAL COMPETITION ON AUGUST 17

The Secretariat General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Setjen Kemhan RI) who was in charge of eight work units (Satker) held a number of competitions in enlivening the 77th Anniversary of the Republic of Indonesia, which began with joint sports at the Bhineka Tunggal Ika field, Kemhan, Jakarta, Friday (12/8). The competition to enliven Independence Day, which is carried out in teams between workers, is expected to increase the spirit of togetherness of members of the Setjen Kemhan who in carrying out their duties are interconnected and work together. In addition, this team competition is expected to train sportsmanship and increase the body's immunity.

In between his busy schedules, the Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, had the opportunity to witness the typical competition on August 17, which was attended by eight security guards in the ranks of the Director General of the Ministry of Defense, namely: The Bureau of Planning and Finance, the Bureau of Personnel, the Bureau of Administration and Protocol, the General Bureau,

the Bureau of Organization and Governance, the Bureau of Rules and Regulations, the Public Relations Bureau of and the Legal Bureau. Typical types of competitions held include a krupuk eating competition, putting nails in a bottle, team clogs racing, moving relay water, and moving marbles with a relay spoon and volleyball matches with a net covered with cloth.\*\*\*



Photo Source : PR Bereau

## MINISTRY OF DEFENSE ENLIVENS THE 27TH NATIONAL TECHNOLOGY AWAKENING DAY BY HOLDING THE R&D WEEK

**D**efense Research and Development Week (R&D) organized by the Kemhan Research and Development Agency (Balitbang) to coincide with the 27th National Technology Awakening Day (Harteknas) which falls on August 10 every year. The R&D Week held at Balitbang Kemhan Jakarta also featured exhibitions of defense research and development results, seminars, and competitions for defense technology innovation works.

R&D week is expected to support the President's policy of changing the paradigm from defense

spending to defense investment. This activity is expected to support the policy of accelerating the increase in the use of domestic products and products of micro, small and medium enterprises and cooperatives in order to make the national movement Proud of Indonesian In the implementation of government procurement of goods and services.

Keep up with technological developments, the nation's children can spur themselves to continue to improve innovation, independence and professionalism, so as to be able to compete with other countries.\*\*\*



Photo Source : PR Bereau

# ACHIEVEMENTS OF THE INDONESIAN DEFENSE UNIVERSITY TOWARDS WORLD CLASS DEFENSE UNIVERSITY



*By: LVice Admiral of the TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng*

Photo Source : PR of Ind Defense Univ

## Introduction

**I**ndonesia is the 48th country to have a Defense Higher Education Institution. Since 2009 the Indonesian Defense University (Unhan) was established with the aim of creating a breakthrough in state defense education that is able to produce reliable defense Human Resources (HR), in building and manning the state defense system to maintain and protect state sovereignty, territorial integrity and the safety of the entire Indonesian nation. Based on the history of the Struggle for Indonesian Independence, state defense is the responsibility of all Indonesian people, both TNI soldiers and other components of the nation. This interest becomes a government program in educating its citizens more broadly about the country's defense. The understanding of state defense is basically not only based on thinking in defense at a limited scope, but in a broader scope that is the national security of a country.

The quality of human resources is a determining factor in the strength and capability of the country's defense to overcome various forms of threats, disturbances, obstacles and challenges to the country. The development of state defense human resources requires continuous innovation and modification in quality and comprehensive education policies

that must be understood by all stakeholders. From the perspective of Modern Educational Philosophy, Unhan RI as a Center of Excellence on Defence Science and Military Intellectual can be viewed from three aspects. Ontologically, Unhan RI focuses on defense science which has the characteristics of a multidisciplinary science with a comprehensive understanding philosophically



Sumber foto : PR Bureau

derived from human needs to always want to get a sense of security and further maintain a sense of security itself. Epistemologically, the holistic development of defense science is organized combining interdisciplinary and transdisciplinary sciences ranging from political, social, economics, humanities, to military techniques and defense technology based on the values of struggle and Indonesian character. There are a lot of advanced technology today developed from military needs. Axiologically, the use of defense science is not only used to fight properly, but also to prevent war and/or end war with dignity. Obviously, the goal of defense science from these three aspects is to maintain human existence with a civilization that is always better.

When the Covid-19 Pandemic hit the world in 2020, Unhan RI developed military medicine, together with military pharmaceutical science with the aim of increasing the adequacy ratio of health workers within the TNI and Kemhan RI. In accordance with these two sciences, Unhan RI also developed military mathematics and military engineering so that 11 Under Graduate (S1) Study Programs were established. When the Covid-19 Pandemic had an impact on declining food security, Unhan RI developed military logistics science through the establishment of 7 Vocational School (D3) Programs. The establishment of the D3 and S1 Study Programs complements the Graduate (S2) and Post Graduate (S3) Study Programs that have been held so far. In order to further ensure the use of defense science, Unhan RI also formed a Certification Institution with the Scheme of Person Certification Institution, Education

Organization Management System Certification Institution and Professional Certification Institution to improve the capabilities and capacities of lecturers in accordance with the competencies built. The development that has been carried out so far is also aimed at reaching the stage in realizing the Indonesian Defense University's vision as a World Class Defense University (WCDU).

### **World-Class Unhan RI Transformation**

Since its inception, Unhan RI has launched its vision to become a leading defense higher education institution with world-class standards while preserving national values. In the future, Unhan RI lecturers meet the requirements and criteria as international lecturers optimizing existing educational technology. The educational curriculum and research topics for theses, theses and dissertations must also have an equality with the defense universities of other countries. Unhan RI has carried out many educational collaborations with various leading universities in the country, such as the University of Indonesia, IPB, ITB, Airlangga University, UGM, Hasanuddin University, Brawijaya University, as well as several universities abroad, such as Cranfield University, U.S. NPS and U.S. NDU, Australian National University, NDU PLA China, Korean National Defence University, Wako University Japan, RSIS, National Defence College of the Philippines, and Burapha University Thailand. Moreover, the Indonesian Defense University has been accepted as an associate member at the European Security and Defense College. The Indonesian Defense University also collaborates with think tank organizations, such as the Asia-Pacific Center for Security Studies and professional organizations, such as the Institute of Electrical and Electronics Engineers, to organize a series of international seminars.

All these achievements until now are considered to meet the targets of the Grand Design of Unhan RI 2015-2039, which is a planning document within a period of 25 years with various activity programs according to stages per 5 years in a structured and systematic manner. The document is also discusses various world strategic issues that are studied in more depth through analysis to further determine appropriate strategies in responding to the challenges faced in the dynamics of the strategic environment. World-class universities contain

the meaning of global parameters that aim to advance the interests and future lives of the Indonesian people so that they can be equal and compete with other nations in the world. The concept is a college concept designed to provide quality educational services, not only to the society in which the university is located, but also to the international community.

Unhan RI has accepted many students from abroad and then in the near future will send its students to attend education at several leading universities in the world for several semesters.

### **Strategic Goals and Objectives of Grand Design Unhan RI**

The objectives of the Grand Design of Unhan RI as A WCDU include; first, developing the potential of candidates for civilian and military leadership who are professional and have the values of fighting and struggle obtained empirically academically through the implementation of the Tridharma of higher education; second, producing graduates who master the fields of defense and defending the country in supporting national interests and being competitive at home and abroad; third, improving the implementation of state defense awareness education programs to the academic community in order to form a dignified national disposition and civilization in order to educate the nation's life; fourth, improving the Tridharma of higher education, administration and operational education and support of educational facilities in the areas of defense strategy, defense management, national security, defense technology, and military health.

In order to ensure the achievement of the Grand Design objectives, a mapping of targets has been prepared that will be focused on by all work units as follows:

1. The first goal, which achieve; a) Graduates who are ready to occupy strategic positions within the TNI, Ministries and Institutions related to the country's defense system; b) Graduates who occupy strategic positions within non-governmental institutions both at the central and regional levels that can contribute to the progress of the country's defense; and c) Graduates who play an active role in supporting the development of Unhan RI.

2. The second goal, which achieve; a) The maximum results of national accreditation by BAN-PT at both the university level and the study program level; b) International recognition of world-class standards of education at Unhan RI formally through higher education rankings; and c) International recognition of world-class standards of education at Unhan RI informally and de facto which is characterized by the high level of sending foreign students, as well as lecturers, teaching staff and international research staff to Unhan RI.
3. The third goal, which achieve; a) The research results of lecturers and students of Unhan RI are at least 80% published in accredited National Journals and / or national and international international journals; b) Unhan RI Journals are nationally accredited (100%) and have international achievements (at least 80%); and c) The results of unhan RI research are able to answer national, regional and international problems in the field of defense.
4. The fourth goal, which is the achievement; a) Recruitment of human resources for lecturers and students of Unhan RI who come from various disciplines (multidisciplinary and interdisciplinary) while still paying attention to the suitability of qualifications and competencies; and b) Increase a wide and strong network of cooperation with universities, research institutes, think-tanks, all defense stakeholders at national, regional and global levels in the scientific and technological development of the defense field.
5. The fifth goal is to increase the capacity and quality of international lecturers, researchers and students and the implementation of various national and international strategic events that can contribute intellectually to the development of the country's defense system.
6. The sixth goal, namely the realization of infrastructure, laboratories, workshops, and educational supporting infrastructure in the fields of defense strategy, defense



Photo Source : PR of Ind Defense Univ

management, national security, defense technology, and military health.

7. The seventh goal, which is the achievement;
  - a) Cooperation in the field of education with various domestic and foreign agencies for the improvement and development of defense science;
  - b) Cooperation in the field of research with various domestic and foreign agencies for the improvement and development of defense science; and
  - c) Community Service Cooperation with various domestic and foreign agencies for the improvement and development of defense science.

### **Policy Direction for Achieving Grand Design of Unhan RI**

In 2015-2019, the formulation of the policy direction is; 1) Strengthening of institutions; 2) Strengthening the quality of graduates; 3) Strengthening research and publication standards; 4) Strengthening the academic community in community service programs; and 5) Strengthening national cooperation networks.

In 2020-2024, the policy direction is; 1) Institutional strengthening; 2) Increasing stakeholder participation in improving the quality of Unhan RI graduates within the central government, and regions and corporations; 3) Improvement of R&D and publications in answering national, regional and international issues; 4) Implementation of Community Service that is right on target according to the needs of the community; and 5) Integrating the nation's thinkers in answering the nation's problems.

In 2025-2029, the policy direction is; 1) Recognition of superior international-scale study programs and branding of Unhan RI in regional forums; 2) Increasing the number of Unhan

RI graduates who occupy strategic positions within the central and regional governments and corporations; 3) Achievement of a new theory of the field of defense; 4) Application of new theories and science and technology in the field of defense in society; 5) Integrating the nation's thinkers in developing defense science and technology; and 6) Strengthening regional and international cooperation networks.

In 2030-2034, the policy direction is; 1) Achievement of international rankings; 2) Increasing the number of Unhan RI graduates who become leaders in their fields; 3) Development and publication of R&D that is able to answer international problems; 4) Improvement of community service programs that become pilot projects at regional forums; 5) Integrating think tanks and pioneering in superior study programs in answering the nation's problems; and 6) Strengthening regional and international cooperation networks.

In 2035-2039, the policy direction is; 1) Unhan RI became WCDU; 2) Strengthening Unhan RI as an education center for prospective national leaders and world leaders; 3) Recognition of world-class Unhan RI research; 4) Improvement of community service programs that become pilot projects at international forums, 5) Development of Unhan RI as a think tank and pioneer in answering various internationally recognized national problems; and 6) International recognition of the results of cooperation in the development of science and technology in the field of defense.

### **Acceleration and Strengthening of 2020-2024**

Acceleration and strengthening of Unhan RI in achieving the Grand Design goals for 2020-2024 in increasing the capacity and quality of international lecturers, researchers and students through organizing national and international strategic events, such as the International Short Course on Managing Defence in a Wider Security Context in collaboration with Cranfield University, and organizing the 21st Century People's Defense and Security System National Conference. Acceleration and strengthening in order to improve the quality of human resources through developing the capacity of lecturers to take courses to gain expertise as international researchers, produce various scientific articles of nationally accredited journals and outstanding international journals, as well as various patents.

The quality of lecturers is also further improved by completing procedures to continue to integrate the Lecturer Evaluation system by Students, and the Lecturer Sociometry system, as the basis for determining the Lecturer Performance Load. In order to support the speed of work of lecturers and students in the teaching and learning process as well as monitoring the progress of all research, Unhan RI has also implemented the use of Smart Campus. The Smart Campus application program is an Academic Information System of Unhan RI based on IOT and the Campus Of Things with the configuration concept : 1) Integrated with various application programs of the Directorate General of Higher Education and the Directorate General of Vocational Studies of the Ministry of Education and Culture-Research and Technology; 2) Integrated with various systems that have been applied so far at the Sentul-Bogor Main Campus, the Satellite Campus in Salemba-Jakarta, and in Belu-East Nusa Tenggara; 3) Make it easier for campus leaders to control lecturers, students, education staff, staff, and all related parties; 4) Minimize operator errors and increase the efficiency of supporting parties; 5) Minimize the cost of campus expenses; 6) Improving the quality of the campus both in terms of services and outputs produced from the campus academic process; 7) Increase the confidence of the business world and industry; 8) Disseminate information widely, quickly, uniformly; 9) Assist, complete, replace the duties of lecturers; 10) Supporting learning activities and lecturer duties in fulfilling the

Lecturer Performance Load as well as assessment based on Lecturer Evaluation by Students, and Lecturer Sociometry; 11) Increase the diversity of reference sources; 12) Increase the attraction to learning; 13) Prevent the possibility of double entry for input or upload of all academic activity evaluation data, all student work, and lecturers; and 14) Make it easier for leaders to analyze and make decisions.

### Closure

Realizing a WCDU for Unhan RI is not an option but as a necessity as well as an obligation. Therefore, the 2015-2039 Grand Design is the basis for various efforts and innovation steps to accelerate and strengthen achievements at each stage. The hope that comes to the fore is that all the achievements of 2020-2024 can be a strong foundation in the next stages. The success of each achievement greatly affects the acceleration and strengthening of subsequent achievements at the same stage of the year, and also at the next stage of the year. The success of each of these achievements is also aimed at fulfilling the Unqualified Audit Opinion of the CPC and realizing 8 areas of change in Bureaucratic Reform from the Ministry of PAN-RB. The success of achievements in the aspects of increasing HR competence, aspects of management and educational technology, aspects of publications, aspects of useful research results, and aspects of sophistication of campus infrastructure can become the pride and icon of Unhan RI.\*\*\*



Photo Source : PR of Ind Defense Univ

# INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER (IPSC) AREA MANAGEMENT WITH ECO-GREEN CONCEPT

By: Brig Gen TNI Sudaryanto,S.E.  
The Head of Area Management Defense Strategic Installation Agency



The need for green open space in an area will attract people to just spend the weekend in order to unwind, do sports and recreational activities. City parks are built in large cities with an eye on the greening and conservation of plants (fauna). The issue of the environment is currently very vigorously campaigned, if you look at the environmental conditions and air quality in a city like Jakarta today is very worrying. The impact of greenhouses and the density of motor vehicles as causes of unhealthy environmental conditions and air quality. The need for green open space in an area will attract people to just spend the weekend in order to unwind, do sports and recreational activities. City parks are built in large cities with an eye on the greening and conservation of plants (fauna). The issue of the environment is currently very vigorously campaigned, if you look at the environmental conditions and air quality in a city like Jakarta today is very worrying. The impact of greenhouses and the density of motor vehicles as causes of unhealthy environmental conditions and air quality.

Bogor as the closest area to Jakarta is one of the cities that become the destination for Jakartans to get fresh air. Therefore, the existence of green open space is very important, especially an area with an eco-green concept that is expected to be able to change an environmental condition that is free from pollution, comfortable and feels cool when the sun is hot.

The IPSC area of an area of 276.9 hectares is an integrated area occupied by several Ministries/ Institutions (K/L) in Sentul, Bogor Regency, West Java. Geologically, the condition of the IPSC Area is a place where trees grow which are classified as lamplance silt soil types, sand soil (development

of review 3 masterplans of the IPSC Sentul area). This type of soil is an advanced weathering of the brexit and lava rocks of Mount Kancana and Mount Limo, the soil is brownish-red, fawn is loose and soft and has high permeability. In certain parts it contains gravel and andesitic rocks (Soil research PT. Benatine Surya Cipta for Pus Lola Area, 2021). Such a soil is very fertile and is a place where various types of plants grow.

In general, the condition of the IPSC area which is at an altitude of 450 meters from sea level is an expansive land where this type of soil will experience large volume changes (expand) in the rainy season and shrink in dry season, this is

due to extreme changes in water content. The main problem is the presence of deformations that exceed elastic deformations (shrinkage). Such conditions require many trees as a binder to prevent landslides.

The Center of Area Management (Pus Lola) Bainstrahan Kemhan in its duties and functions as an element of the implementation of the duties and functions of security, maintenance and development, development and cooperation of strategic defense installations in its work program including the maintenance of common use infrastructure (used together) realizes that

and as a result of human actions. To maintain landslides due to disruption of the stability of soil or rock slopes. Pus Lola must control the triggering factors for disturbances in the soil stability of the area. ....

As the person in charge of the management of the potential disaster area, it must be minimized. Area Management Centre is determined to make the IPSC Area as a forest area that is maintained its sustainability but does not rule out as a strategic defense area. This created the idea of implementing the eco-green concept as an open space that is beneficial for the survival of the

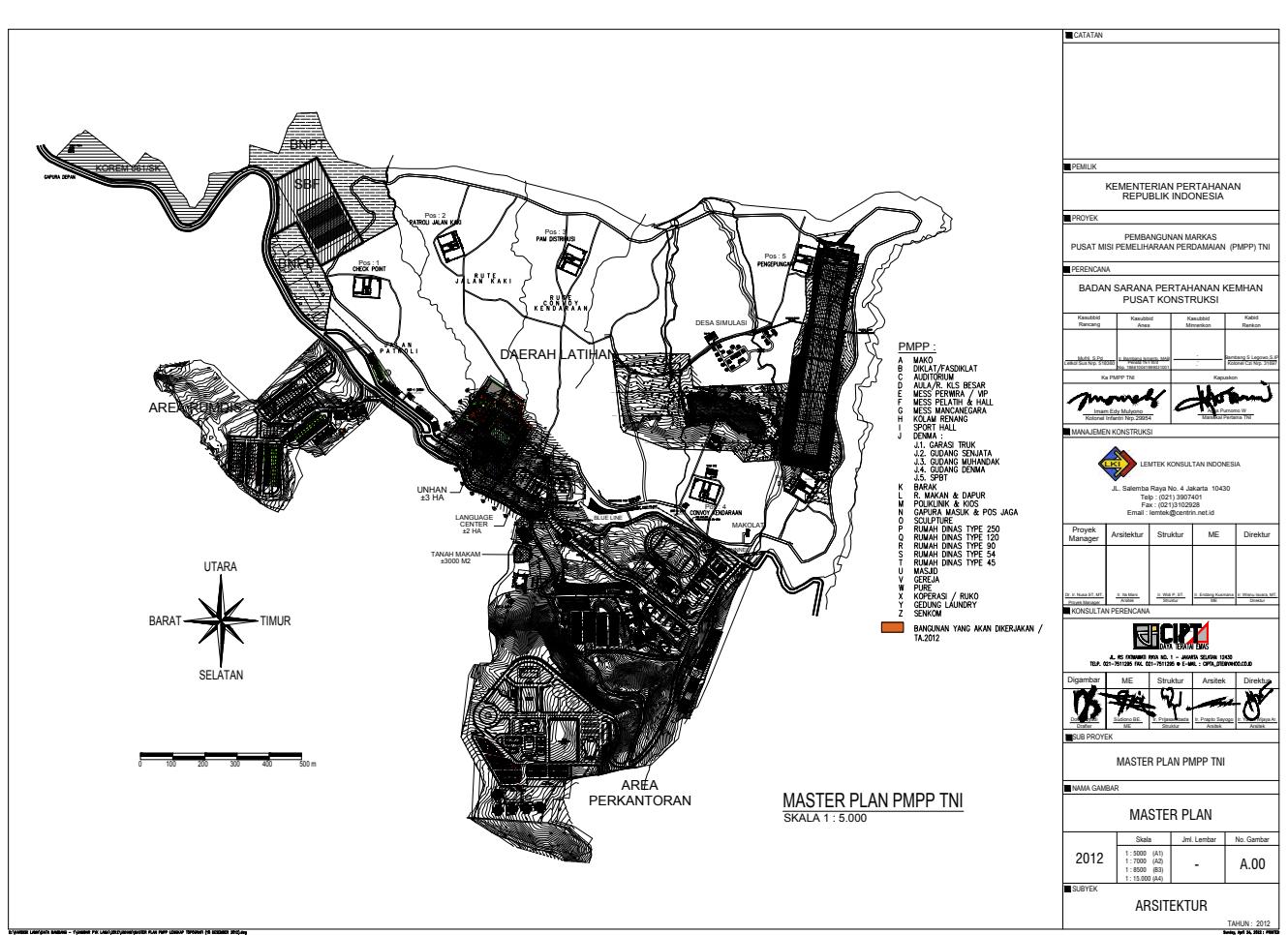


Photo 1: PSC Area Map

Photo Source: Doc of Area MDSI Agency

this area contains great potential both potential as an area needed to support the lungs of the city of Bogor and also the potential cause of disasters if not managed by adhering to the natural balance between human living space and its environment. The potential disaster in question is a landslide event as a consequence of natural dynamic phenomena to achieve new conditions due to disturbances in the balance of the marbled IPSC Area that occurs both naturally

region itself and the Ministries/institutions (K / L) Area to support training and improve the quality of human resources (HR). The eco-green concept is in order to protect the environmental capabilities of the area from the pressure of change due to the negative impact of the construction of facilities and infrastructure in the region.

The eco-green concept is currently also very much discussed, the application of the concept

in a very large area certainly requires hard work and concern for the environment so that the goal of creating an environmentally friendly environmental condition is realized. Based on the eco-green concept, this invites us to return to nature by allowing the land in the area to remain covered by plants and trees rather than buildings.

The application of eco-green in the management of the IPSC area by Pus Lola Kawasan as an effort to provide a space for interaction between living things and living things as well as living things with the environment with this aim will create a fertile area but there is a potential for disaster if ecosystems and habitats for living things are not maintained. be in it. The IPSC area will be greener with a sustainable movement that aspires to become an area as a green open space (RTH) whose design is from the planning, implementation and use of environmentally friendly materials as well as the effective and efficient use of energy and data sources so as to bring mutual benefits.

The main (intrinsic) function of RTH as an ecological function according to the Regulation of the Minister of Public Works No.05 / PRT / M / 2008 concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Green Open Space that can provide guarantees for the procurement of RTH to be part of the air circulation system or can be said to be the lungs in an area, as a microclimate regulator so that air and water circulation can naturally take place smoothly, trees as shade can produce oxygen, their roots can absorb rainwater, life protectors of animal habitats, leaves absorb air pollutants and windbreaks.

Besides being the main function of the IPSC Area management, the target with the eco-green concept is an additional (extrinsic) function, especially related to the socio-cultural function that this area is in the middle of a community that has already occupied the area as a residence, this area must describe the expression of local cultural wisdom, make the area a communication for local residents, recreation places and as a forum for research, education and training in studying nature. The economic improvement in this function is more about the results of waste processing which will be designed to be environmentally friendly so that the final results of waste processing can be used for fertilizer and provide K / L income in the region. Fertilizer products can be used to support agricultural businesses, plantations and others.

The IPSC area is made as beautiful as possible so that it can increase comfort, stimulate the creativity and productivity of residents around the area and create a harmonious and balanced atmosphere between built and the unbuilt areas. So, physically IPSC Area Management as a provider of RTH in the form of wild, natural, protected forests in which protected trees grow also become ecological, socio-cultural, and economic functions.

Defense University of the Republic of Indonesia (UNHAN RI) dan Language Agency of the Ministry of Education and Culture Research and Technology

In supporting the eco-green concept is to maintain and improve drainage or water absorption as one of the important foundations for plants. This system is a place for water absorption in areas of land where there are protective plants so that water can flow from high places to low places so as to prevent water inundation.

In addition to maintenance of drainage channels, the IPSC area has a hilly landscape where vegetation in the landscape element has the types of hardwood trees that can grow upright, large in size with sturdy branches and thick twigs. Plants that grow a lot in the area such as Trembesi Trees, Mahogany Trees, Acacia Trees and some wild trees that grow in the TNI PMPP training area. The TNI PMPP training area located in the IPSC area also has shrubs and bushes as landscape elements as resistant cover elements besides grass.

The arrangement of plant vegetasi in the IPSC Area at the same time has an aesthetic function that has beauty value because certain types of shrubs can bloom well and can provide visual control and physical barriers, namely that the plant is a barrier to human movement in maintaining the exercise area naturally. The advantages of being a green open space with plants that grow well include preventing erosion considering that there are human activities in the area that use land for agriculture in addition to causing positive effects can also cause negative effects on land conditions. For example, what often happens is a change in the level of the soil, in the presence of large trees and shrubs can hold rainwater directly and indirectly to the soil surface.

In the eco-green concept in the management of the Pus Lola Area in the development of the Bogor IPSC Area masterplan in 2021, it will carry out sustainable greening of plants, especially plants

that are very useful and in accordance with the condition of the regional soil surface. The types of plants that will continue to be developed and planted are Bamboo Trees as trees that can already grow well in areas other than Bamboo Trees the plants that are planned to be developed in the IPSC Area are Resin Trees, Ironwood Trees, and Sandalwood Trees which are plants with rare categories.

Bamboo Trees that are well known to the local community and play an important role in life, this can be seen from the many uses of bamboo in various purposes since the ancestors. The benefits of bamboo in the midst of world environmental conditions related to the issue of global warming due to illegal logging have a significant environmental damage impact. Meanwhile,

efforts to improve forests (restoration) take more than 10 years because of the very long and slow growth nature.

Bamboo is easy to grow and does not require special maintenance, besides that bamboo has economic value because the results can be obtained sustainably without replanting. Behind the ease of course there is a factor of weakness of this plant. The durability of bamboo as a building material is not durable and lasts less than 5 years. The use of bamboo for furniture often gives rise to the connotations of the poor.

In addition to Bamboo in supporting the eco-green concept of the IPSC Area with greening while preserving rare plants. Planting rare trees such as Damar, Ulin, and Sandalwood is an



Photo 2 : Ind Defense Univ and Language Agency Ministry of Education and Culture

Photo Source : Doc of Area MDSI Agency

Photo 2 : Ind Defense Univ and Language Agency Ministry of Education and Culture

Photo Source: Doc of Area MDSI Agency



option to increase the amount of vegetation in the area. Resin trees can be used to take the sap as a resin producer. The resin produced by the Resin Tree basically there is liquid resin and solid resin. After Damar, trees that are suitable for the region are Ulin and Sandalwood Trees. Both are trees that are very rarely found, Ulin is a tree originating from the forests of Kalimantan that can grow large as a shade and can be the home of the habitat of birds. Ulin trees have an important ecological role as a good oxygen producer in the process of photosynthesis can also retain groundwater, retain water and affect the microclimate. Some people certainly don't know that Ulin is efficacious as a medicine, Ulin leaves contain chemical compounds (Geoprak Gunung Meratus blog, 2019). Ulin leaves contain phytochemicals such as flavonoids, saponins, tannins and sterol-terpenoids. IPSC areas located in the highlands of sandalwood trees are also expected to grow well and sandalwood is also often found in areas full of volcanic rocks. There are two types of sandalwood known, namely Red Sandalwood and White Sandalwood. Sandalwood's distinctive aroma comes from the wood and bark of the tree, often used for spices, incense, aromatherapy, a mixture of perfumes and keris sheaths.

IPSC Area Management with an eco-green concept will not be successful without clear

zoning. Based on the results of soil investigations, water management studies and avalanches as well as analysis and design of soil retaining walls, especially at the location of the TNI PMPP shooting range and artificial lakes for anti-terror exercises. So it is considered necessary to zoning with considerations and calculations if it is going to make new buildings and development facilities, especially regarding the calculation of building structures and infrastructure facilities of the IPSC Area. Zoning includes the Red Zone, Yellow Zone and Green Zone, where zones that have the potential for landslides and cause disasters are included in the red category, zones that can be built for infrastructure but with the provision of being included in the yellow category and zones that can still be used to build green category buildings. The application of zoning refers to the Minister of Environment and Forestry No. 1 of 2022 concerning the Assessment Program for Company Performance Improvement in Environmental Management (PROPER). The criteria for implementing proper assessment at the Kawasan Lola Pus provide provisions for the Regional K/L to control water pollution, water conservancy, air pollution, B3 waste management, land damage and trash management.

The zoning created by Pus Lola Area will be a guideline for K/L in establishing buildings because

the facilities and infrastructure will continue to grow. It will indirectly increase the population of the region. This will also increase the amount of waste from activities. The determination of the final landfill (TPA) must be precise and accurate. Waste that is managed according to the eco-green concept is environmentally friendly.

Waste must be separated, organic waste will be processed into fertilizer to fertilize plants. Its organic content will improve the structure of the soil and increase the soil's ability to maintain groundwater content. Organic waste that has decayed can become humus as a source of food for vegetation to increase soil aeration. Meanwhile, in addition to organic, there is also waste that can be recycled into useful items.

The location of the TPA in accordance with Law 18 of 2018 states that every area must

have a Regional TPA, the Pus Lola Kawasan will determine the location of the TPA with the requirements that it is easily accessible by the Regional K/L, as far as possible from the Regional K/L office, can accommodate all waste K/L and meet the requirements for the location of the waste incinerator.

With good management, the eco-green concept of the area that has previously implemented the go-green program will make the IPSC Area become the lungs of Bogor Regency, especially those that have benefits to the entire community and K/L Area. The beautiful, cool and pollution-free atmosphere makes the IPSC Area a magnet for sports trails, tourist destinations and a place for good vegetation research.\*\*\*



Photo 4 : Damar Tree in IPSC Area

Photo Source : Doc of Area MDSI Agency



# JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL POSITION DOCTRINE OF STATE DEFENSE

By: Navy Col (K) Dr. Steven T. Sambouw, S.H., S.Kep., M.H., M.A.P

Head of Sub-Directorate of Sunjaklakhanneg Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan

Photo Source : Personal Doc

## A. Introduction

### 1. Background

National defense is the main element of a country that is considered a core value or something that is considered the most vital and very essential because it involves the existence of a country's survival . [Kalev J. Holsti, International Politics: A Framework of Analysis, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), p. 200.] The management of the national defense system as one of the functions of the state government is aimed at protecting national interests and supporting national policies in the field of defense.

The preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution stipulates that the Government of the Republic of Indonesia is obliged to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice. Based on these provisions, it can be concluded that protecting the entire nation and the entire homeland of Indonesia from every form of threat from outside and/or from within the country is essentially one of the functions of the state government.

### 2. Understanding/Essence of Hanneg's Doctrine

The doctrine of national defense is essentially a teaching about the fundamental principles and

values of national defense which are believed to be true, extracted from the values of the nation's struggle and past experiences to be used as lessons in developing the concept of national defense in accordance with the demands of the task of national defense faced with various dynamics of change, and packaged in the frame of national interest.

In addition, the National Defense Doctrine is also a guideline for the implementation of Sishankamrata which involves all citizens, territories, and other national resources, and is prepared early by the government and is carried out in a total, integrated, directed, and continuous manner to uphold state sovereignty, territorial integrity, and the safety of all nations from all threats.

### 3. The Urgency of Drafting the Doctrine of National Defense

To realize a strong national defense and be able to face various threats in accordance with the condition of the character of the Indonesian nation as a nation of fighters by instilling values that serve as guidelines and national identity, it is necessary to formulate the National Defense Doctrine which is held through Sishankamrata with reference to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 27 paragraph 3 which mandates that every citizen has the right and obligation to participate in state defense efforts and Article 30 paragraph 2 which states that state defense and security efforts are carried out through the Universal People's Security Defense System.

#### B. Discussion

1. Principles of Formation of Legislation (Beginselen van Behoorlijke Regelgeving) Article 5 of Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation states that in forming laws and regulations it must be carried out based on the following principles:

a. Clarity of purpose; is that every formation of legislation must have a clear goal to be achieved.

- b. The right forming institution or official or known as the principle of beginsel van het juiste organ; is that every type of statutory regulation must be made by a state institution or an authorized statutory-forming official. These laws and regulations can be canceled or null and void if they are made by state institutions or officials who are not authorized.
- c. Conformity between types, hierarchies, and payload materials; is that every formation of laws and regulations must really pay attention to the right content according to the type and hierarchy of laws and regulations.
- d. Can be implemented; is that every formation of laws and regulations must take into account the effectiveness of these laws and regulations in society, both philosophically, sociologically, and juridically.
- e. Usability and effectiveness; is that every formation of legislation is made because it is really needed and useful in regulating the life of society, nation and state.
- f. Clarity of formulation; is that every formation of laws and regulations must meet the technical requirements for the preparation of laws and regulations, systematic, choice of words or terms, as well



Photo Source : PR Bereau

as legal language that is clear and easy to understand so as not to cause various kinds of interpretations in its implementation.

- g. Openness; is that in the formation of laws and regulations starting from planning, drafting, discussing, ratifying or courts, and the promulgation is transparent and open. Thus, all levels of society have the widest opportunity to provide input in the formation of legislation.

There are several experts who express opinions regarding the principles related to the formation of legislation, one of which is I.C. van der Vlies divides beginselen van behoorlijke regelgeving into formal principles including:[ I.C. van der Vlies as quoted from Hamid S.Attamimi, 1990, The Role of Presidential Decrees of the Republic of Indonesia in the Implementation of State Government: An Analytical Study. Regarding Presidential Decrees with Regulatory Functions in the Pelita I-Pelita IV period, Dissertation, Doctoral Faculty of Postgraduate University of Indonesia, p. 336.]

- a. The principle of clear objectives (beginsel van duidelijke doelstelling), which includes three things, namely regarding the accuracy of the location of legislation within the framework of general government policies, the specific objectives to be formed, and the objectives of the parts to be formed.
- b. The principle of the right organ/institution (beginsel van het juiste organ), this is to confirm the clarity of the organ that stipulates the legislation.
- c. The principle of the need for regulation (het noodzakelijkheids beginsel) is a principle that explains various alternatives and the relevance of the formation of regulations to solve government problems.
- d. The principle can be implemented (het beginsel van uitvoerbaarheid), namely that the regulations made should be enforced effectively.
- e. The principle of consensus (het beginsel van consensus), namely the people's agreement to carry out obligations and bear the consequences caused by a regulation consistently. This is in view of

the establishment of laws and regulations as the first step to achieve the goals that are 'agreed upon' by the government and the people.

## 2. Position and Legal Basis of National Defense Doctrine

As explained in the first paragraph that Sishankamrata is a national defense concept based on the Total War strategy which requires the important role of the unity of the people with professional soldiers as the core of the defense force . The era of globalization which is marked by the development of advances in science, technology, communication, and information greatly affects the patterns and forms of threats. Threats to state sovereignty that were originally conventional (physical) and are now developing into multidimensional (physical and non-physical), both originating from abroad and from within the country. These multidimensional threats can come from ideological, political, economic, socio-cultural issues as well as security issues related to international crimes, including terrorism, illegal immigrants, the dangers of narcotics, theft of natural resources, piracy, violation of territorial boundaries, destruction of environment, and so on. All of this causes defense problems to become very complex so that the solution does not only rely on the ministry that handles defense, but also becomes the responsibility of all relevant agencies, both government and non-government agencies. Therefore we need a National Defense Doctrine that can be the basis as well as a reference in the preparation of the implementation doctrine in each K/L.

The position and stratification of the National Defense Doctrine is at a strategic level on a national scale for the management of the national defense system. The doctrine of State defense is positioned as a basic instrument in developing all doctrines related to national defense, including the doctrine of military defense (TNI) and non-military defense. As a basic instrument in developing, as well as as a reference for all doctrines related to national defense, both military defense and non-military defense, it is appropriate that the doctrine of national defense is regulated by a Government Regulation which mutatis mutandis binds all Ministries/Agencies, Regional Governments and other elements of the nation in accordance with with statutory regulations.



Photo Source : PR Bereau

So far, the national defense doctrine has been stipulated by a Minister of Defense Regulation which causes reluctance and doubt as well as indecision in the follow-up of Ministries/Agencies outside the defense sector in formulating derivative doctrines under it. Several Ministries/Agencies stated that they already have Standard Operating Procedures (SOPs) in dealing with threats related to their field of duty, but they are not yet in line with national defense policies so that they are difficult to integrate. The determination of the National Defense Doctrine by Regulation of the Minister of Defense gives the impression that the Doctrine is the Defense Doctrine of the Ministry of Defense.

The legal basis for the preparation of the National Defense Doctrine is clearly not found in various regulations that apply in Indonesia, except in the Regulation of the Minister of Defense Number 12 of 2021 concerning the Policy for the Implementation of State Defense for the Year

2020-2024 article 3 letter a. In Law Number 3 of 2002 concerning National Defense Chapter V Article 20 paragraph (2) which is explained in the explanation of the article, it is implied that there is a desire for legislators to provide space for the preparation of the National Defense Doctrine. The full text of Article 20 paragraph (2) and the explanation of the article are as follows:

## CHAPTER V

### DEFENSE CAPABILITY MANAGEMENT

#### Article 20

(1) The management of national defense capability is aimed at the implementation of a national defense system as referred to in this law.

(2) All national resources in the form of human resources, natural and artificial resources, values, technology, and funds can be utilized to

improve the state's defense capability which will be further regulated by a Government Regulation.

Article explanation:

Article 20

Paragraph (1)

Quite clear

Paragraph (2)

What is meant by values are a set of institutions, principles, and conditions that are believed to be true to be used as an instrument of regulating life in measuring performance, both morally and physically and at the same time showing the identity and identity of the person concerned.

Values related to the national defense system, among others:

- a. The values contained in Pancasila and the 1945 Constitution.
- b. The values contained in the Sapta Marga, the Soldier's Oath, and the TNI Doctrine.
- c. Value as a nation of warriors.
- d. Mutual cooperation value.
- e. New values that are in accordance with the needs of the Indonesian people.

The explanation of an article in a statutory regulation is an official interpretation to provide information on a matter that is still debatable. Starting from the explanation of Article 20 paragraph (2) of Law Number 3 of 2002, it shows that there is a conformity between the "values" referred to in the a quo law article with what is contained in the National Defense Doctrine which is the principles and values of the Republic of Indonesia. fundamental values extracted from the historical values of the nation's struggle and past experiences, in seizing, maintaining and filling independence, which reflect the values of heroism, patriotism and nationalism, and are manifested in a sense of brotherhood, shared fate, mutual cooperation, deliberation for consensus, tenacity, toughness, believe in one's own strength, never give up, and willing to sacrifice. These values are reflected in the involvement of all citizens, regions, and all national resources in

the struggle of the Indonesian nation, so that it is in accordance with the meaning of the universal people's defense and security system which is characterized by democracy, universality and territoriality.

The placement of the "values" diction in Article 20 paragraph (2) of the a quo law, including state institutions or officials forming laws and regulations authorized by legislators is not without reason, because of the position of the National Defense Doctrine which is part of These "values" are so noble that they deserve to be further regulated by Government Regulation.

### C. Closing

1. The doctrine of national defense is a noble value whose position is at a national-scale strategic level in terms of managing the national defense system
2. Based on the principles and theory of the formation of laws and regulations, it shows that the effectiveness of the law contained in the Regulation of the Minister of Defense concerning the Doctrine of National Defense has not been achieved because it has not been in accordance with the principle of beginsel van het juiste organ, namely the proper forming institution or official. So far, regulations related to the National Defense Doctrine are regulated by the Minister of Defense Regulation, so it seems that the scope of application of these regulations is only within the Ministry of Defense.
3. Therefore, according to the explanation of Article 20 of Law Number 3 of 2002, the National Defense Doctrine should be regulated by a Government Regulation so that mutatis mutandis binds all Ministries/ Agencies, Regional Governments, and all other elements of the nation.\*\*\*

# DEVELOPING THE COUNTRY DEFENSE HEALTH SYSTEM IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ERA

By: drg. Pongki Sipahutar,Sp.KG

Senior Defense Analyst, Directorate General of Defense Power, Ministry of Defense



Photo Source : PR Bureau

## INTRODUCTION

National defense is all efforts to defend the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the entire nation from threats and disturbances to the integrity of the nation and state (Ministry of Defense No. 24 of 2014). In order to implement National Defense, the concept of National Defense is needed.

In the concept of National Defense there must be a National Defense System, namely a defense system that is total defense (semesta) which involves all citizens, territories, and other national resources and is prepared early by the government and is carried out in a total, integrated, directed and continuous manner to uphold state sovereignty, integrity and integrity. Territory and the safety of the entire nation from all threats. One of these threats is an epidemic which is part of the threat in the health sector which is an integral part of the National Defense System (Jakumhanneg No. 8 of 2021). Thus, the State Defense in the Health Sector is called State Defense Health, namely the totality of health resources in the territory of the Republic of Indonesia including personnel, facilities, health

facilities and infrastructure belonging to the government and private sector which can be used to support the implementation of the tasks of the National Defense (Ministry of Defense No. 24 of 2014). The National Defense Health System (Siskeshanneg) is an order that brings together various efforts of the Indonesian nation in an integrated and mutually supportive manner, so that all elements of health are able to provide health support for the implementation of national defense efforts. (Ministry of Defense 24 of 2014). Siskeshanneg is part of the National Health System. The National Health System (SKN) is a form and method of implementing health development that combines various efforts of the Indonesian nation in one step in order to ensure the achievement of health

development goals within the framework of realizing people's welfare as referred to in the 1945 Constitution.

In Siskeshanneg there are several functions. These functions are carried out through the implementation of the function of inventory, identification, guidance, development, mobilization and demobilization of health in an integrated and mutually supportive manner to ensure the achievement of a strong national defense.

The Siskeshanneg consists of all health components, both at the regional and central levels, which is organized by involving all components of the Siskeshanneg both at the central and regional levels. 24 of 2014 concerning Siskeshanneg).

Based on the Minister of Defense 24 of 2014, Siskeshanneg is divided into subsystems, a. Geomedical Information System, b. health human resources, c. material Health, d. health facilities and infrastructure, e. health technology and natural resources, and f. health efforts.

The form of the implementation of the Siskeshanneg development is arranged in an integrated manner including: a. strategic planning of national defense health at the central level and tactical planning at the regional level; b. organizing at the central and regional levels; c. implementation of national defense health efforts; and D. monitoring and evaluation.

Siskeshanneg becomes a reference in the preparation and implementation of national defense health development, starting from planning activities to monitoring and evaluation. We are now entering the digitalization era where we still have to build a strong, tough and solid Siskeshanneg. This is to anticipate the multidimensional threats in the present and the future. Threats to the state today are no longer conventional or military in nature. A number of possibilities that are non-military in nature or collaboration of both and are multidimensional in nature must also be anticipated. This point of view must be interpreted with full vigilance. Because it can no longer consider every threat to the state only conventional. The development of information technology is currently considered to be able to blur geographical and administrative boundaries that have a broad impact, including national defense. The multidimensional crisis covers various sectors

ranging from health, economics, politics, even to the information crisis. The multidimensional crisis is not only experienced by a few countries, but all countries in the world feel the crisis. Military health needs to be further developed by prioritizing health for science-based and high technology-based National Defense that is adapted to the development of the strategic environment.

Now we are entering the era of the industrial revolution 4.0, in this era everything is computer-based. All Siskeshanneg subsystems should begin to be directed to digital systems, starting from the ge . sub-system medicine to monitoring and evaluation. For that we have to start with a new concept of building a digital era Siskeshanneg. Developing Siskeshanneg is a big job that requires careful planning and is carried out in an integrated and massive manner. With the new concept, the expected strategic goals are also new.

The ability of a soldier (professional soldier) is a very decisive indicator in the success of building Siskeshanneg. These abilities can be improved through good coaching. Coaching can be interpreted as all efforts, activities and work related to planning, preparation, development, deployment, use and control which includes activities of aligning and regulating everything so that it can be carried out and carried out properly, orderly, neatly and thoroughly according to plans and regulations. Implementation program (in accordance with the provisions, instructions, norms, requirements, systems and methods) in a successful and efficient manner in achieving goals and obtaining better results (Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 12 of 2014). The guidance carried out must be in accordance with the strategic objectives of the organization, it cannot be achieved in the near future. Therefore, it is necessary to set the strategic goals of the organization in stages, the need for continuous steps (miles stones) in order to achieve the main strategic goals of the organization.

From the description above, several problems can be found, namely how to build a national defense health system that is able to overcome health problems in the Ministry of Defense and the TNI in the era of the industrial revolution 4.0, as well as the strategic role of Ministry of Defense health and TNI in facing

multi-dimensional threats in the present and future

## PROBLEMS

In building Siskeshanneg in the digitization era, you will encounter various problems such as how to build a national defense health system through a good plan within the Ministry of Defense and the TNI, whether the existing organization is capable enough to deal with multidimensional threat problems in the present and the future, how to implement efforts state defense health in the face of multi-dimensional threats, how is it monitored and evaluated?

In discussing the problems above, the author tries to review these problems through a strategic planning approach, an organizing approach, an approach to implementing state defense health efforts, and monitoring and evaluation.

## DISCUSSION

### STRATEGIC PLANNING APPROACH TO STATE DEFENSE HEALTH

In carrying out their duties and functions, TNI soldiers have the duties of OMP (Military Operations for War) and OMSP (Military Operations Other than War) (Law No. 34 of 2004 concerning the TNI). In the framework of OMP,

TNI health soldiers will support activities in war military operations, while in OMSP TNI health soldiers support military operations activities other than war such as disaster management, dealing with pandemics of a disease. Success in carrying out the duties of health workers is highly dependent on the knowledge, skills and motivation of the people who are responsible for their duties. That's why in dealing with threats in the health sector, health workers are the main thing.

Planning is an activity that needs to be carried out as well as possible because planning is the first step to achieve the success of the task. In simple terms, planning is a logical thinking process and a rational decision-making process before carrying out an action. This will help us in projecting the future and deciding the best way to deal with various situations that will occur in the future.

In the strategic planning of the State defense health system based on the Siskeshanneg subsystem, it can be explained as follows:

#### Sub Sistem Informasi Geomedik;

We are now in the era of the industrial revolution 4.0, which is the era of digitization. Siskeshanneg in the geomedical sub-system



Photo Source : PR Bereau

has to plan for digitization as early as possible so that what we want regarding health strength data can be arranged properly, because health strength data is the basis for making programs or activities. This data will give all the idea about the strength, capability and endurance of the Siskeshanneg. Building an integrated health information system is a difficult but necessary first step.

Building this information system means that we build a wide network throughout the Ministry of Defense and the TNI. So that we will create big data regarding health strength, capability and resilience in an integrated, measurable and integrated manner. This can facilitate the mobilization and organization of troops in support of military operations tasks quickly and precisely and well-coordinated. In building information systems an integrated system must be carried out with high military standards by having a comparative advantage and confidentiality can be maintained.

Regarding non-military defense in Presidential Regulation no. 8 of 2021 concerning Jakumhanneg, that TNI Health supports military operations other than war, which explains the existence of civil-military collaboration in its implementation. Nationally integrated military civilian data is needed for non-military defense in the health sector. To combine the two data, it is necessary to form a non-military defense coordination body in the health sector at the national level. This is because there are health data that are widely distributed throughout Indonesia, both private and government, of course, causing difficulties in coordination. The Ministry of Defense can initiate the formation of a national non-military defense coordination body in the health sector.

#### **Health Human Resources;**

Military Health Human Resources is an important element in Siskeshanneg, therefore it is necessary to create military Health Human Resources that have more capabilities. In terms of planning to build strong military health human resources, the right method is needed through a stage where each stage must be passed well, until it reaches the main goal. Building strong military health human resources can be done by building physical, mental, ideological and science-based knowledge. The application of science in the form of science and technology

must be carried out. Military health human resources in the digital era must have high intellectual skills, so that they can easily respond to the problems they face. The Ministry of Defense plays an important role in shaping the concept of developing military health human resources through capacity building education oriented to mastery of science and technology. The Ministry of Defense can apply Science and Technology through the Health Directorate General of Defense Ministry by making a policy/regulation, which regulates a measure that must be achieved for military health human resources. With policies/regulations, it can produce the expected military health human resources. Until now there are still many standards that have not been met so that it is difficult to get the expected military health human resources. One of them is military health human resources who are technology and information literate. The concept of developing military health human resources must continue to be developed because military health problems continue to develop.

In the face of threats in the health sector that are difficult to detect in the future, the concept of developing medical intelligence is an urgent one. Medical intelligence is all efforts, work, and activities of implementing intelligence functions in the health sector (Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 38 of 2013). Medical intelligence will always move to anticipate the threats ahead. The development of health human resources for medical intelligence is the main priority scale, because the strategic information obtained is the beginning of the development of Siskeshanneg in the future.

#### **Health Material**

Material is part of state assets consisting of certain units that can be counted, measured and or weighed which is obtained at the expense of the State Revenue and Expenditure Budget or comes from other legitimate acquisitions (Ministry of Defense of the Republic of Indonesia Number 12 of 2014 concerning Principles of Material Development National Defense within the Ministry of Defense and TNI). Many health material problems exist, are all health materials recorded? Are health materials used properly? Are all the health materials met? Can health materials meet the needs of soldiers? Is the health material well standardized? For this reason, a more in-depth study is needed.

Health material problems are closely related to the health material industry, because health materials are produced from industry. It should be a concern now to develop or create a new health materials industry. There is a need for regulations that regulate the material industry in the health sector. The Ministry of Defense must be able to make these regulations. A concept regarding the development of the health industry is needed for national defense. Digitizing health materials is an important step in building a strong Siskeshanneg. With this digitization, the existing problems related to the classification, processing, distribution, testing and material development can be resolved. With a strong and independent health industry, multi-dimensional threats can be overcome.

#### **Health Facilities and Infrastructure;**

Strategic planning to prepare an independent and strong military hospital is the main thing in building *Siskeshanneg*. Military hospitals owned by the Ministry of Defense and the TNI must have their own characteristics related to the ability to support military operations. The Ministry of Defense can draft a high standard military hospital, according to the task the main thing is. In addition to supporting military

operations, the Ministry of Defense hospitals must also be able to provide services to their families and utilize their facilities for the benefit of the state in realizing general welfare.

Military hospitals must have the ability to cope with the health of soldiers in military operations and are also intended to deal with threats in the health sector that are increasingly widespread and difficult to predict, so military hospital facilities need to be fully equipped. As a power base in the siskeshanneg military hospitals also have the ability to detect threats that will occur, through the development of modern equipment based on high technology. Facilities and infrastructure that support military hospitals must also be adapted to their needs.

Building a hospital with high military standards and state-of-the-art facilities is an expected priority. In addition to military hospitals, field hospitals are of course a priority for development, because in carrying out military operations, field hospitals can be operated in any position. Entering the digitization era, military hospitals are expected to be connected from the center to the regions, this will make it easier to coordinate related to the mobilization and implementation of military health within the



Photo Source : PR Bereau

## Ministry of Defense and the TNI.

The Ministry of Defense and TNI hospitals as the front fortresses facing multi-dimensional threats are expected to be developed as Health Security Centers (HSC). HSC became the beginning of a tug of war for Indonesia's health security problems, which penetrated the national and regional dimensions of the country. This condition demands a new spirit for the state to redefine the role and function of its national resilience in the health sector. HSC is not only concerned with the field of infection, but the global political, economic, migration and climate change situation characterizes the National Health Security structure, so that the state must be able to seek and reformulate the functions of rapid, detect, prevent and respond based on the characteristics geomedical maps and the strength of community participation as a force for national resilience.

## Health Technology and Natural Resources

Building high-tech military health is the main goal of building Siskeshanneg. All Siskeshanneg subsystems must be able to adapt to high technology that can be applied from the administrative system to the implementation of tasks in the field.

The era of the industrial revolution 4.0 requires the siskeshanneg to be built with the application of advanced technology. Detection of threats that are difficult to detect can be overcome. It needs a concept in applying technology in building Siskeshanneg. Utilization of natural resources will be easier by using advanced technology. We can cultivate natural resources for the benefit of national defense.

## ORGANIZING APPROACH

In the General Policy of National Defense for 2020-2024 (Presidential Decree Number 8 of 2021), it is stated that based on the development of the strategic environment, it can be predicted that there will be threats that need to be considered by defense policy makers. Prediction of real threats at any time can occur and can be categorized into military threats, non-military threats and hybrid threats. In dealing with threats in the health sector, a strong defense health system is needed. A strong health defense means being able to face various threats in the health sector.

Observing the threats that already exist and will arise in the present and in the future, the organization can now be considered to be developed according to the development of the strategic environment. Organizations now have to add new functions by making organizational changes. The development of health organizations will certainly continue to experience changes because the threat is already multi-dimensional. Building Siskeshanneg must be adapted to the threat. With multi-dimensional threats, functions that do not yet exist must be generated or in other words new functions must be added.

Changes in the national, regional and international strategic environment that are very fast and full of dynamics require the need for a change in strategy at the Directorate General of Health of the Ministry of Defense, followed by organizational development. The country and even the world are facing the COVID-19 pandemic which has caused many victims and destroyed all aspects of life. With this situation we are forced to make changes from the old conditions. We need new strategies in dealing with future threats.

Organizational development is a planned effort made at the organizational level to increase effectiveness and/or enable the organization to set new strategic goals. Organizational development can be done as a strategy for strengthening, structuring, and adjusting the organization, so as to improve organizational capabilities and performance effectiveness. Based on the problems faced now and the project due to the emergence of health problems in the future, organizational development is a priority in the Directorate General of Health of the Directorate General of Defense of the Ministry of Defense.

Many benefits are provided by organizational development. Organizational development will create a pattern of constant improvement, where the use of organizational development strategies is developed, evaluated, implemented, and assessed for quality. In general, the purpose of organizational development is for organizations to better respond and adapt to changes and technological advances as well as multidimensional threats. Organizational development is also an important tool in managing and planning organizational growth.



Sumber foto : PT Palindo

In carrying out organizational development, structured and systematic steps are needed. The steps for structuring the functions within the Ditkes organization of the Directorate General of Defense of the Ministry of Defense are carried out in several ways, including integration of existing health work units in the Ministry of Defense, developing (adding) new functions, increasing the effectiveness of functions, combining (merging) functions within the Work Unit and many other methods that can be used for organizational development.

#### **APPROACH TO IMPLEMENTING STATE DEFENSE HEALTH EFFORT**

Health effort is any activity and/or a series of activities carried out in an integrated, integrated and sustainable manner to maintain and improve the health status of the community in the form of disease prevention, health improvement, disease treatment, and health restoration by the government and/or the community. (Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health).

The Ministry of Defense regulates the planning, procurement, utilization, guidance and quality control of military health personnel in the context of providing military health services. In general, health efforts within the Ministry of Defense and the TNI include pro-motive, preventive, curative and rehabilitative.

In health efforts in accordance with the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 38 of 2013 concerning Standardization of Preventive Health Workers in the Ministry of Defense and the TNI, the task of preventive health workers is to carry out health maintenance and improvement activities in: OMP, OMSP, training areas, health facilities and unit/base headquarters. These efforts are in the form of health maintenance and health improvement. Efforts to maintain and improve health within the Ministry of Defense and the TNI have been carried out well, carried out on individuals, households and units or bases.

In supporting the government's efforts to improve the welfare of its people, the Ministry

of Defense and the TNI are united in the success of health services in accordance with the Social Security Service Agency for the Health Sector. Health services using BPJS Kesehatan have integrated ways to provide health services that have been standardized at the national level. All TNI soldiers and their families are members of the BPJS Health, which has a clear way of providing services.

## MONITORING AND EVALUATION APPROACH

Supervision activities basically have a role to compare existing conditions with conditions that should occur. If in the process there are deviations/obstacles/deviations, corrective action can be taken immediately. To obtain more effective results, supervision is carried out not only at the end of the management process but at every level of the management process. Terry and Leslie also explained that supervision is the process of evaluating the implementation of work by comparing what is expected (goals and objectives) and taking the necessary actions (Terry, George R. and Leslie W. Rue, Management Fundamentals, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005). Suharismi and Safrudin argues that evaluation is an activity to collect information about the work of something, which is then used to determine the right alternative in making decisions (Arikunto Suharsimi, Dan Cepi Safrudin. Evaluation of Education Programs, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008). Evaluation is an activity carried out to measure and compare the results of the implementation of activities with the standards that have been achieved in order to obtain information on the value or benefits of an evaluation subject. The information obtained can be used in alternative decision-making (Terry, George R. and Leslie W. Rue, Management Fundamentals, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

After the planning of the new National Defense health system is designed and implemented, it is necessary to carry out monitoring and evaluation. Supervision to see whether the new National Defense health system is in accordance with the development of the strategic environment. If there are obstacles, it is necessary to evaluate the plan.

## CLOSING

From the description of building Siskeshanneg in the Industrial Revolution

Era 4.0, the Siskeshanneg subsystem must experience development in accordance with the development of the strategic environment, so that in implementing OMP and OMSP tasks can address multidimensional threats.

## CONCLUSION

*First*, developing the National Defense Health System in the Industrial Revolution 4.0 era can be done with approaches, namely the strategic planning approach to national defense health, organizing, implementing national defense health efforts, as well as monitoring and evaluation approaches.

*Second*, developing the National Defense Health system must go through good milestones so that the main goal of a strong national defense health system can be achieved.

*Third*, Human Resources is the most important element in the Siskeshanneg which plays a role in maintaining the stability and sustainability of the Siskeshanneg development.

*Fourth*, organizational development is carried out based on the development of the strategic environment and the development of threats in the health sector.

## RECOMMENDATION

*First*, the Ministry of Defense in this case the Directorate General of Defense of the Ministry of Defense must be able to apply advanced Science and Technology in developing the National Defense Health System.

*Second*, organizational development can be carried out as soon as possible so that the siskeshanneg problems can be overcome.\*\*\*



• • • • •



In a series of G20 activities, an international seminar took place in Belitung, Bangka Belitung Islands Province, which was attended by a number of delegations of representatives of countries such as France, India, Saudi Arabia, South Africa, the Netherlands, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States, Spain and Turkey. The seminar, which was held on 7-9 September 2022, carried the theme, "Harnessing The Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia". This seminar was held as part of the G20 Ministerial Development Meeting with the aim of strengthening cooperation between the aerospace industry in Indonesia and the government and industry both at home and abroad as well as academia. In this seminar, there was also the signing of an MoU on cooperation between Airbus Defence and Space and Airbus Helicopters with PTDI over the production of aerostructure components of PTDI helicopters and military aircraft.\*\*\*





Head of the Rehabilitation Center of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kapusrehab Kemhan) Brigadier General of the TNI dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp. RAD officially opened the Kapusrehab Cup XV wheelchair tennis tournament in 2022 at the tennis court of the Bogor Regency Local Government Hall, Cibinong, West Java, Tuesday (23/8). The wheelchair tennis tournament which took place one day was attended by wheelchair tennis athletes who are members of the National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) throughout Indonesia. This tournament is a training event for wheelchair tennis athletes who will compete in the upcoming National Paralympic week.\*\*\*



Head of the Public Relations Bureau of the Setjen Kemhan Brigadier General of the TNI Taufiq Shobri led a medical examination in the form of a urine check for personnel of the Public Relations Bureau of the Setjen Kemhan, in Kemhan, Jakarta, Monday (19/9). This examination is to ensure the health of members of the Public Relations Bureau, especially in terms of preventing the use of psychotropic drugs. The results of the examination stated that all employees of the Public Relations Bureau of the Director General of the Ministry of Defense who were examined tested negative and there was no indication of the use of psychotropic substances.\*\*\*





Coinciding with a historic and proud day for the entire TNI family, the 77th Anniversary of the TNI on October 5, 2022, Secretary General of the Kemhan Vice Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto released 22 (twenty-two) Kemhan personnel who entered their retirement period. They consist of 9 (nine) TNI personnel and 13 (thirteen) civil servant personnel. Previously, on the same day and place in the Kemhan State Defense field, a ceremony commemorating the 77th Anniversary of the TNI took place and acted as the Inspector of Ceremonies of the Secretary General of the Ministry of Defense.\*\*\*



Secretary General of the Ministry of Defense (Secretary General of Kemhan) Vice Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto accompanied by DWP chairperson Setjen Kemhan Mrs. Yayuk Donny Ermawan attended the commemoration of the Islamic New Year 1 Muharam 1444 H / 2022 AD at the At-Taqwa Mosque Kemhan, Wednesday (3/8). This short lecture is the first time it has been carried out face-to-face after the COVID-19 pandemic. The theme raised was, "With the Spirit of the Islamic New Year 1 Muharam 1444 H / 2022 AD, we increase faith and devotion to Allah SWT to realize disciplined and professional Kemhan employees". This theme contains the meaning that Kemhan employees continue to improve faith and piety as a basis for forming a superior character as the driving wheel of the organization. The character in question is religious, disciplined, professional, loyalty and responsible.\*\*\*





# INDO DEFENCE 2022 EXPO & FORUM

incorporating with

INDO  
AEROSPACE  
2022 EXPO & FORUM

INDO MARINE  
2022 EXPO &  
FORUM

THE 9<sup>th</sup> INDONESIA'S OFFICIAL TRI-SERVICE DEFENCE,  
AEROSPACE, MARITIME, AND SECURITY EVENT  
**"PEACE, PROSPERITY, STRONG DEFENCE"**

2 - 5 NOVEMBER 2022

JIEXPO KEMAYORAN, JAKARTA - INDONESIA

SCAN ME  
to Visit



<https://visitorreg.id/q/IDD22>



3 - 4 NOVEMBER 2022

AIRCRAFT DISPLAY | HALIM PK SOUTH APRON\*

NAVAL SHIP DISPLAY | PONDOK DAYUNG DOCK\*

\*Terms and Conditions are applied. Registration and accommodation available only at JIExpo. Bus will wait at JIExpo's parking area and will directly enroute to JIExpo.

SUPPORTED BY



KNOWLEDGE PARTNER



OFFICIAL AND EXCLUSIVE  
SHOW DAILY



MEMBER OF

Indo Defence Expo & Forum

@IndoDefence

@Indo\_Defence

info@indodefence.com

[www.indodefence.com](http://www.indodefence.com)

